



Pemerintah  
Kota Batam

**LAPORAN**

**KINERJA**

**2023**

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami sampaikan ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam ini dapat diselesaikan dalam waktunya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Batam selama tahun 2023, serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif-efisien, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh merupakan pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kota Batam yaitu "TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA", sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 Pemerintah Kota Batam dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, tidak hanya sebagai laporan Kinerja pertanggungjawaban tahun 2023 saja, tetapi merupakan serangkaian capaian target sampai dengan tahun kedua dibandingkan dengan pertanggungjawaban target-target RPJMD 2021–2026 Pemerintah Kota Batam.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Batam Tahun 2023.

Batam, 27 Maret 2024

Wali Kota Batam



Muhammad Rudi

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja Sasaran Strategis dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Batam memiliki sebelas sasaran strategis yang meliputi keberhasilan peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang sinergis, mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Secara umum keberhasilan program-program sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan pengguna layanan. Uraian tingkat ketercapaian/ketidaktercapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

Selain pencapaian target tahun 2023, laporan kinerja tahun 2023 ini juga menginformasikan pencapaian target RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kota Batam sampai dengan tahun 2023 (tahun kedua RPJMD).

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
Target	Realisasi	Capaian
5,91%	6,84%	115,74%

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

Indeks Gini		
Target	Realisasi	Capaian
0,325	0,336	96,73

3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan

Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan		
Target	Realisasi	Capaian
69,40	71,44	102,94

4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera

Indeks Pembangunan Manusia		
Target	Realisasi	Capaian
81,74	82,64	101,10

Persentase Penduduk Miskin		
Target	Realisasi	Capaian
4,69%	5,02	93,43

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland

Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland		
Target	Realisasi	Capaian
59,41	67,94	114,36

6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi

Indeks Reformasi Birokrasi		
Target	Realisasi	Capaian
70,01 (B)	81,92 (A-)	117,03

7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah		
Target	Realisasi	Capaian
9,51%	44,37	466,56

8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan

Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
Target	Realisasi	Capaian
94,46	94,75	100,31

9. Menurunnya Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka		
Target	Realisasi	Capaian
9,75%	8,14	119,78

10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas

Opini BPK		
Target	Realisasi	Capaian
WTP	WTP	100

Nilai LPPD		
Target	Realisasi	Capaian
Sangat Tinggi	Sedang (2,65)	80

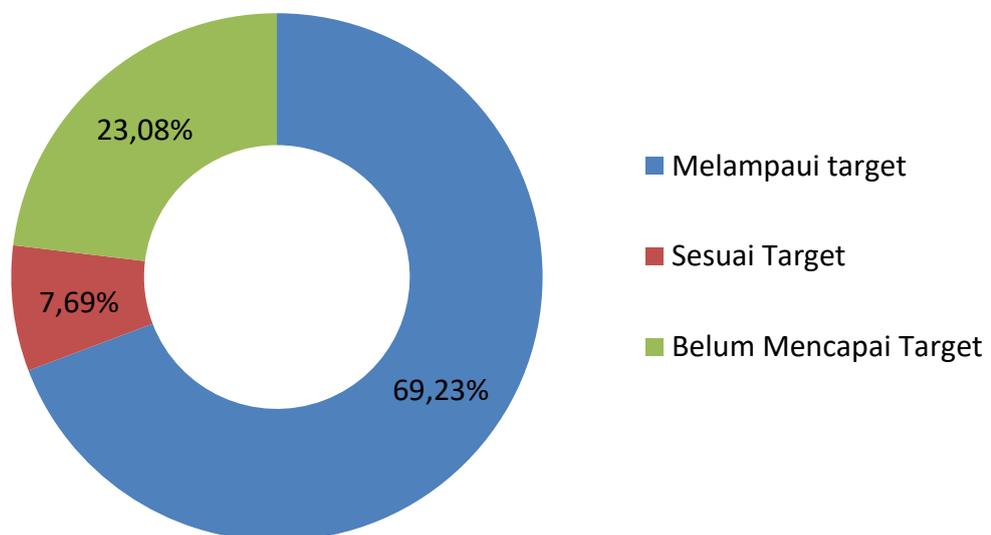
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indeks SPBE		
Target	Realisasi	Capaian
3,18	3,77	118,55

Berdasarkan tabel di atas dan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam, tahun 2023 ditetapkan 11 sasaran dengan 13 Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. 9 Indikator atau 69,23% Melampaui target
2. 1 Indikator atau 7,69 % Sesuai target
3. 3 Indikator atau 23,08% Belum mencapai target

### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023**



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kewenangan dan Tugas Pokok .....	2
a. Kewenangan .....	2
b. Tugas Pokok .....	2
C. Struktur Organisasi dan Aparatur Pemerintah .....	3
a. Struktur Organisasi .....	3
b. Aparatur Pemerintah .....	4
D. Isu Strategis .....	6
Bab II Perencanaan Kinerja .....	7
A. Rencana Strategis .....	7
B. Perjanjian Kinerja 2023 .....	12
C. Dukungan Anggaran .....	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	16
A. Akuntabilitas Kinerja Sasaran .....	24
1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing .....	24
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif .....	30
3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan ..	43
4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera .....	76
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland .....	105

6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi .....	121
7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam .....	144
8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan .	148
9. Menurunnya Angka Pengangguran .....	153
10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas .....	158
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi .....	165
B. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran .....	167
Bab IV Penutup .....	170

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja yang dimandatkan. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKjIP disusun secara sistematis dan periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diberikan berupa sasaran kinerja dan sumber daya yang telah dikelola untuk mencapai sasaran kinerja, Pemerintah Kota Batam telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023, Laporan Kinerja yang telah disusun memberikan gambaran tingkat ketercapaian kinerja, analisis ketercapaian kinerja tersebut yang meliputi faktor keberhasilan atau kegagalan, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, penggunaan anggaran, dan upaya ke depan yang akan dilaksanakan. Informasi yang tersaji dalam LKjIP Kota Batam Tahun 2023 ini juga menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Wali Kota kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK

### a. Kewenangan

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

### b. Tugas Pokok

Pemerintah Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Batam yang Bermartabat dan Batam yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.

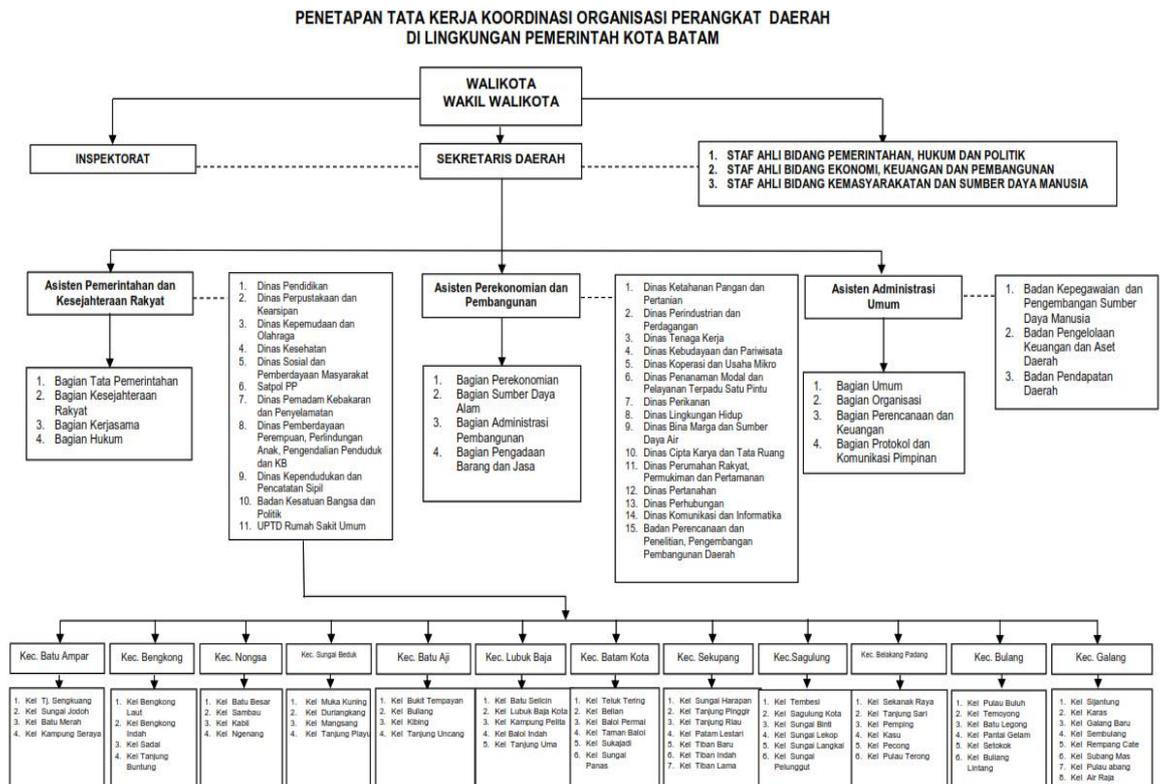
## C. STRUKTUR ORGANISASI DAN APARATUR PEMERINTAH

### a. Struktur Organisasi

Batam sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam pada gambar berikut dibawah ini :

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Batam

b. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2023 sejumlah 8.828 orang yang terdiri dari 5.628 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.200 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam menurut:

- Golongan

Golongan I	:	23 orang
Golongan II	:	664 orang
Golongan III	:	4.122 orang
Golongan IV	:	819 orang

- Jabatan

- Jabatan Struktural, yang terisi 797 orang yang terdiri dari :

JPT	:	38 orang
Administrator	:	185 orang
Pengawas	:	574 orang

- Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 6.495 orang, terdiri atas :

Tenaga guru	:	4.276 orang
Tenaga kesehatan	:	1.293 orang
JFT lainnya	:	926 orang

- Tingkat Pendidikan

SD	:	20 orang
SMP	:	16 orang
SLTA	:	642 orang
D1	:	4 orang
D2	:	53 orang
D3	:	1.076 orang
D4	:	202 orang
S1	:	6.349 orang
S2	:	463 orang
S3	:	3 orang

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam juga telah mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi manajerial. Adapun Jumlah pegawai yang mengikuti diklat ini sebanyak 42 orang masing-masing :

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 2 orang
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 40 orang

Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Teknis dengan mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 63 orang. Dan peningkatan pelayanan melalui tugas belajar:

1. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang melepaskan jabatan menggunakan dana APBD sebanyak 2 orang.
2. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang melepaskan jabatan menggunakan dana APBN/Kemenkes/Biaya Mandiri sebanyak 20 orang.
3. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar Program S1 yang tidak melepaskan jabatan menggunakan biaya mandiri sebanyak 32 orang.
4. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar Program S2 yang tidak melepaskan jabatan menggunakan biaya mandiri sebanyak 22 orang

Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS. Penanganan kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat pada tahun 2023 sebanyak 29 orang.

#### D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan roda Pemerintah, sesuai RKPD Perubahan 2023 telah ditetapkan prioritas penanganan, antara lain:

1. Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19
2. Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Reformasi Birokrasi
4. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional
5. Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
6. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7. Peningkatan Infrastruktur wilayah Hinterland Kota Batam
8. Mengembangkan Wilayah (Kecamatan) untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
9. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD
10. Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia
11. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
12. Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kota Batam untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, isi, serta program pemerintah Kota Batam tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Batam Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.

VISI Pemerintah Kota Batam sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2021-2026 yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA  
MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

#### **Bandar Dunia**

Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi *"center of excellence"*;

## **Madani**

Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius;

## **Sejahtera**

Mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada;

## **Modern**

Sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Pemerintah Kota Batam menetapkan Misi:

### **1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama dan keempat, Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan

keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

**2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang**

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai "Bandar Dunia" yang "Modern". Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

**3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia Berkeadilan**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" dan "Modern", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

**4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia” yang “Modern”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

**5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani” yang “modern”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Batam merumuskan Tujuan serta Sasaran Strategis Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing
  1. 1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan;
  1. 2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam;
  1. 3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam;
  
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.
  2. 1. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah
  2. 2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah
  2. 3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya
  2. 4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
  
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan
  3. 1. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten
  3. 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
  3. 3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni
  
4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera
  4. 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat
  4. 2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
  4. 3. Meningkatnya daya beli masyarakat
  4. 4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan

4. 5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat
  4. 6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah
  4. 7. Menurunnya angka pengangguran
  4. 8. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland
    5. 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland
    5. 2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland
    5. 3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland
  6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi
    6. 1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
    6. 2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah
    6. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

## B. PERJANJIAN KINERJA 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, telah menuangkan sasaran strategis yang ditetapkan beserta indikator ketercapaian dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berikut merupakan PK Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,91%
2.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	Indeks Gini	Indeks	0,325

3.	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	69,40
4.	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,74
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,69%
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	59,41
6.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70 (B)
7.	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	9,51
8.	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,46
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,75
10.	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Indeks	3,18

### C. DUKUNGAN ANGGARAN

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Batam mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.346.504.242.658,- dengan perincian dukungan anggaran tiap sasaran kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Anggaran
1.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,91%	Rp. 15.731.118.973,-
2.	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	Indeks Gini	0,325	Rp. 14.246.592.512,-
3.	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	69,40	Rp. 462.522.681.894,-
4.	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	81,74	Rp. 554.388.739.573,-
		Persentase Penduduk Miskin	4,69%	
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	59,41	Rp 122.525.723.288,-
6.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (B)	Rp. 5.438.866.500,-

7.	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	9,51	Rp. 940.526.000,-
8.	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,46	Rp. 19.366.892.440,-
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	9,75	Rp. 19.049.357.317,-
10.	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	Opini BPK	WTP	Rp. 126.755.289.986,-
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks SPBE	3,18	Rp. 5.538.454.175,-

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran yang ditetapkan merupakan cara untuk mencapai sasaran strategis dan membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran strategis yang langsung dirasakan masyarakat (pengguna layanan), menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis (berupa indikator kinerja dan target), serta memilih program dan kegiatan yang paling efektif- efisien selaras untuk mencapai tujuan.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel  
Predikat Nilai Capaian Kinerja  
Dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel  
Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran  
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Batam melalui

Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.108/HK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Batam melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Batam tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel  
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam  
Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,91	6,84	115,74
2	Indeks Gini	Indeks	0,325	0,336	96,73
3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	69,40	71,44	102,94
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,74	82,64	101,10
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,69	5,02	93,43
6	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	59,41	67,94	114,36
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,01 (B)	81,92	117,03
8	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	9,51	44,37	466,56
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,46	94,75	100,31

10	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,75	8,14	199,78
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00
12	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sedang (2,65)	80,00
13	Indeks SPBE	Indeks	3,18	3,77	118,55

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam  
Tahun 2023

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,91	6,84	115,74
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	2	Indeks Gini	Indeks	0,325	0,336	96,73

3	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	69,40	71,44	102,94
4	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,74	82,64	101,10
		5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,69	5,02	93,43
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	6	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	59,41	67,94	114,36
6	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,01 (B)	81,92	117,03
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	9,51	44,37	466,56
8	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,46	94,75	100,31

9	Menurunnya Angka Pengangguran	10	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,75	8,14	199,78
10	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00
		12	Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sedang (2,65)	80,00
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	13	Indeks SPBE	Indeks	3,18	3,77	118,55

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

### Tabel

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran  
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

NO.	PREDIKAT	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Baik	>90	13
2	Baik	75.00 – 89.99	-
3	Cukup	65.00 – 74.99	-
4	Kurang	50.00 – 64.99	-
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	-
6	n/a	-	-
		Jumlah	13

**Tabel**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Kota Batam Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49.9	50.00 – 64.99	65.00 – 74.99	75.00 – 89.99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
<b>A. Misi 1</b>								
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	1	115,74	-	-	-	-	Sangat Baik
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif	1	96,73	-	-	-	-	Sangat Baik
3	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	1	466,56	-	-	-	-	Sangat Baik
<b>B. Misi 2</b>								
4	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	1	102,94	-	-	-	-	Sangat Baik
<b>C. Misi 3</b>								
5	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	2	97,26	-	-	-	-	Sangat Baik

6	Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan	1	100,31	-	-	-	-	Sangat Baik
7	Menurunnya Angka Pengangguran	1	119,78	-	-	-	-	Sangat Baik
<b>D. Misi 4</b>								
8	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland	1	114,36	-	-	-	-	Sangat Baik
<b>E. Misi 5</b>								
9	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi	1	117,03	-	-	-	-	Sangat Baik
10	Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	2	90,00	-	-	-	-	Sangat Baik
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	1	118,55	-	-	-	-	Sangat Baik

**Sumber:** Pengolahan Data

## A. AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam dan analisisnya adalah sebagai berikut.

### 1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	5,05	6,84	135,45	7,52	90,96
2023	5,91	6,84	115,74		90,96

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Tahun 2023 merupakan tahun kedua RPJMD pada kinerja nyata atas sasaran ini dengan indikator "Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Adapun realisasinya sebesar 6,84% dari target sebesar 5,91% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,74%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan, namun tidak terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 7,52% maka capaian kinerjanya pada tahun 2023 sudah mencapai 90,96%.

Capaian ini didorong dengan implementasi sektor perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada industri besar yang ada di kawasan industri saja, namun memperhatikan juga pengembangan sektor ekonomi lain sehingga capaian lebih optimal. Selain itu adanya peningkatan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan perdagangan di Kota Batam yang menyebabkan perekonomian bergerak ke arah positif melebihi target yang ditetapkan. Hal

ini juga dikarenakan dilakukan upaya percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dengan rencana tindak lanjut berikut:

1. Memfasilitasi akses bagi usaha mikro ke pusat perdagangan;
2. Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di bidang pariwisata;
3. Pemasaran dan promosi yang optimal;
4. Penurunan sukudana bergulir menjadi 4% (sesuai ketentuan berlaku);
5. Fasilitasi ruang usaha mikro yang akan dibangun pemerintah;
6. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang menjual produk lokal;
7. Operasi pasar dan bantuan sembako untuk mengontrol harga dan menekan laju inflasi.

Hal ini dapat dilihat dan diukur dengan pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) dan pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum). Untuk melihat perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor)	3,01%	13,00%	431,89%	4,53%	3,59%	79,25%	7,12%	50,42%

2	pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	2,45	54,38	2219,59 %	3,7%	48,78%	1318,38%	7,41%	658,30%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		1325,74%			698,82%			-	-

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

**1. Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor)**

Capaian kinerja nyata pada pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) sesuai tabel di atas pada tahun 2023 adalah sebesar 3,59% dari target sebesar 4,53% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 79,25%, capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 431,89% tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun ini dikarenakan adanya perbedaan cara penghitungan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Kota Batam maka capaian kinerjanya sudah mencapai 50,42%.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda motor) di Kota Batam adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor) tahun n dibanding tahun n-1, sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/penurunan kinerja. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Adapun faktor pendukung dalam pencapaian kinerja indikator ini dikarenakan adanya akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan BP Batam sehingga mendorong pertumbuhan investasi yang signifikan;

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih ada keterbatasan kewenangan oleh pemerintah daerah terkait kebijakan perdagangan;
2. Masih kurangnya sarana pendukung distribusi perdagangan.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan adanya perbaikan regulasi dalam hal kebijakan perdagangan terkait kewenangan pemerintah daerah;
2. Memperbaiki pengelolaan pasar rakyat serta pusat distribusi dalam rangka memperlancar arus distribusi perdagangan.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang seperti melaksanakan kegiatan yang mendukung program pengembangan ekspor untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan sub sektor perdagangan

## **2. Pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)**

Indikator ini merupakan salah satu dari indikator sasaran strategis Wali Kota Batam terkait dengan Misi ke-1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Capaian indikator kinerja nyata pada “pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)” yang mendukung pencapaian sasaran dengan realisasi sebesar 48,78 dari target sebesar 3,7% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 1318,38%, capaian sangat melebihi target. Dengan ini, bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 2.219,59%, mengalami penurunan yang dapat dilihat juga bahwa hal ini sangat berpengaruh dengan peningkatan ekonomi Kota Batam, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam maka capaian kinerjanya sudah mencapai 658,30%. Perlu tinjauan ulang terhadap target ini, mengingat capaian yang sudah sangat tinggi.

Konsumsi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat akan turut menentukan kecepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan terciptanya pemerataan pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan.

Atas capaian kinerja tersebut, maka terdapat beberapa faktor pendukung dalam pencapaiannya antara lain:

1. Adanya dukungan perbaikan infrastruktur yang memadai sebagai akses kepariwisataan.
2. Adanya kebijakan pengembangan destinasi wisata yang dilakukan sebanyak 1 lokasi pada tahun 2022 yang masih dilanjutkan pada tahun 2023 ini.

Adapun faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Masih perlu peningkatan kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih terbatasnya promosi dan pemasaran Pariwisata dengan menggunakan berbagai Media, dari 5 media promosi yang ditargetkan hanya 2 media promosi yang terlaksana yaitu TPO dan Pameran;
3. Kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha sektor pariwisata terutama terkait sektor akomodasi dan makan minum;

Namun demikian terhadap capaian kinerja ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Kota Batam, dengan melakukan langkah-langkah/upaya sebagai berikut:

1. Melakukan mitigasi bencana (baik alam maupun non alam) yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kota Batam.

2. Meningkatkan media promosi kepariwisataan baik di dalam negeri maupun luar negeri
3. Kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemanfaatan media promosi
4. Pembinaan terhadap pelaku usaha sektor kepariwisataan terutama sektor akomodasi dan makan minum

Dalam hal peningkatan yang perlu diperhatikan oleh Kota Batam, dapat disampaikan rekomendasi perbaikan tahun yg akan datang sebagai berikut:

1. Memperbaiki sinergi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor pendukung lainnya secara terintegrasi, seperti sektor olahraga, sektor seni budaya, sektor usaha mikro dan kecil, sektor industri kreatif dan sektor lainnya yang dapat menjadi pengungkit sektor pariwisata Kota Batam;
2. Menyusun desain, strategi dan rencana aksi pada pengembangan ekosistem bisnis pariwisata dan ekraf dalam konsepsi kota cerdas.
3. Memprioritaskan pencapaian target sesuai dengan RPJMD untuk program yang belum terealisasi 100%.
4. Meningkatkan kerjasama kepariwisataan baik dalam maupun luar negeri.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	498.905.412,-	403.463.294,-	80,87
2.	Pengembangan Ekspor	46.397.500,-	41.053.500	88,48
Total		545.302.912,-	444.516.798,-	81,52

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	641.783.800,-	608.628.450,-	94,83
2.	Pemasaran Pariwisata	1.478.277.900,-	873.810.478,-	59,11
3.	Pengembangan Kebudayaan	8.847.781.461,-	6.386.945.325,-	72,19
4.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	63.414.000,-	49.802.000,-	78,53
5.	Pengelolaan Permuseuman	1.241.895.900,-	1.160.359.284,-	93,43
Total		12.273.153.061,-	9.79.545.537,-	73,98

Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

## 2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

Indikator Kinerja : Indeks Gini

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	0,330	0,336	98,18	0,300	88,00
2023	0,325	0,336	96,73		89,29

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Indeks Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan jika terhadap suatu distribusi pendapatan, dan nilai Koefisien Gini mendekati nol (0) maka makin merata. Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Patokan tersebut dapat diperhatikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Tahun 2023 adalah pelaksanaan tahun kedua RPJMD pada indikator Indeks Gini, capaian kinerja indikator tahun ini adalah sebesar 96,73%, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 98,18% maka terjadi penurunan sebesar 1,45 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 0,300 maka capaian kinerjanya pada tahun 2023 sudah mencapai 89,29%.

Meningkatkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026. Diukur dengan Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah, Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro, Nilai Tukar Nelayan dan Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel  
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan  
Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	5,27%	5,73%	108,73	6,77	6,79	100,30	12,16%	55,84
2	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	23,34%	23,50%	100,69	25,51	25,71	100,78	34,34%	74,87
3	Nilai Tukar Nelayan	101,00%	101,00%	100,00	101,5	101,85	100,34	103	98,88
4	Pertumbuhan Kawasan/ Klaster Kreatif Daerah	76,07%	100,00%	131,46	78,07	100	128,09	84,07%	118,95
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		110,22%			107,38%			-	-

**Sumber:** Bapelitbangda Kota Batam

### 1. Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah

Adapun capaian kinerja nyata dari indikator Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah pada tahun 2022 dari target 5,27% terealisasi 5,73% dengan capaian 108,73%, terjadi peningkatan target indikator pada tahun 2023 yang memiliki target 6,77% dan terealisasi sebesar 6,79% dengan capaian kinerja 100,30%, hal ini karena tahun 2022 masa pemulihan pasca penanganan pandemic covid-19. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja ini sudah mencapai 55,84%. Untuk menentukan Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah
2. Luasnya akses permodalan
3. Terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha Industri Kecil Menengah Kota Batam dengan pelaku usaha di luar daerah.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah adalah:

1. Aturan pengiriman barang keluar Kota Batam yang tidak sama dengan status kepabeanaan daerah lain;
2. Rantai pasok industri yang tidak saling mendukung;
3. Terbatasnya sumber bahan baku.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Mempertemukan pelaku UKM dengan akses pembiayaan baik itu perbankan, non perbankan maupun lembaga keuangan lainnya
2. Mengikutsertakan pelaku UKM secara bergiliran untuk mengikuti kegiatan pameran.
3. Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi usaha untuk meningkatkan kualitas produk, dan pendampingan bagi para pelaku UKM.

#### Gambar

Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk IKM/UKM di Kota Batam



*Sumber: Disperindag Kota Batam*

## **2. Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro**

Koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 21 Tahun 2015, bahwa pemeringkatan koperasi harus dilaksanakan oleh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi yang telah Terakreditasi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial (Permenkop no 21 tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi). Adapun kriteria koperasi berkualitas terdiri dari beberapa aspek yaitu:

### **a. aspek kelembagaan koperasi;**

meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota;

### **b. aspek usaha koperasi;**

ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan;

### **c. aspek keuangan koperasi;**

ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela;

**d. aspek manfaat koperasi terhadap anggota;**

ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka;

**e. aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat;**

ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Indikator ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (pasal 5, UU No. 20/2008 Tentang UMKM). Berdasarkan hal tersebut, capaian Indikator Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2022 dari terealisasi 23,5% dengan capaian 100,69% dari target yang diperjanjikan, dan target tahun 2023 sebesar 25,51%, terealisasi 25,71% dengan capaian 100,78%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja ini sudah mencapai 74,87%.

Atas capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Belum semua Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan pelatihan karena anggaran yang terbatas
2. Jumlah ASN Pembina Koperasi yang kurang memadai.
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi.
4. Masih terbatasnya akses untuk memasarkan produk KUM sehingga peran pemerintah harus dapat membantu para pelaku KUM untuk bisa menembus pasar. Misalnya mengikutsertakan pelaku KUM dalam pameran.
5. Modal untuk mengembangkan usahanya terbatas permodalan. Selama ini KUM cenderung mengandalkan kantong pribadi untuk mengembangkan usahanya dan ini pun tidak terhitung besar.

Sehingga hal tersebut menjadi kendala para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

6. Masih minimnya kemampuan para pelaku KUM dalam hal manajemen. Terutama soal pembukuan karena pada umumnya para pelaku KUM belum mampu memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui pemberian DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro
2. Permodalan Koperasi yang mendukung pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai karena pengembangan usaha koperasi tidak akan lepas dari besar kecilnya permodalan.
3. Terbangunnya jaringan kerjasama usaha koperasi, sehingga memungkinkan koperasi untuk saling bekerjasama.
4. Manajemen koperasi yang lebih bersifat manajemen partisipatif yaitu pengelolaan koperasi dengan melibatkan berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anggota, pengurus maupun karyawan.
5. Tingginya minat pengelola perusahaan dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha
6. Terlaksananya kerjasama antara pelaku usaha mikro Kota Batam dengan pelaku usaha di luar daerah.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan kementerian/KL dalam upaya dukungan DAK mendapatkan pagu yang lebih maksimal
2. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dan ASN Pembina Koperasi.
3. Perancangan pembangunan aplikasi Jaringan Usaha Koperasi. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam sudah merancang sebuah aplikasi jaringan kerja sama antara koperasi penyedia produk

- (barang dan jasa) dengan koperasi yang membutuhkan produk (barang dan jasa) dengan nama SIMPELKOP.
4. Mengikutsertakan pelaku KUM secara bergiliran untuk mengikuti kegiatan pameran.
  5. Melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi usaha untuk meningkatkan kualitas produk, dan pendampingan bagi para pelaku KUM.

### Gambar

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK  
Di Kota Batam



Sumber: Diskum Kota Batam

### Gambar

Pelaksanaan Gebyar UMKM di Kota Batam



Sumber: Diskum Kota Batam

### 3. Nilai Tukar Nelayan

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan yang mencapai target karena didukung dengan peningkatan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil yang merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Batam yang dilaksanakan melalui Dinas Perikanan.

Nilai Tukar Nelayan digunakan sebagai indikator meski kinerja juga meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan karena pelaku utama yang dominan pada sektor perikanan di Kota Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternatif. Oleh sebab itu Nilai Tukar Nelayan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan di Kota Batam.

Indikator Nilai Tukar Nelayan ini adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar nelayan ( $I_b$ ) dinyatakan dalam persentase. Sehingga dapat dilihat pada Indikator Nilai Tukar Nelayan dari target 101% terealisasi 101% dengan capaian 100%, dan tahun 2021 memiliki target 100,5% dan terealisasi 100,5% dengan capaian 100%.

#### Gambar

Pendampingan Lapangan Perikanan



*Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam*

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap masih sedikit
2. Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidaya ikan dan pengolahan ikan belum maksimal.
3. Kualitas SDA Perikanan perairan Kota Batam semakin menurun
4. Kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan belum memadai
5. Jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan belum memadai.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang telah memenuhi SOP melalui pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Batam
  2. Adanya pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI)
  3. Ketersediaan ikan konsumsi yang banyak di perairan Kota Batam.
- Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan database UPI
2. Koordinasi dengan kementerian dalam upaya mendapatkan dukungan maksimal DAK terkait bantuan sarana dan prasarana

#### **4. Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif**

Indikator Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif ini adalah meningkatnya Kawasan atau klaster ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Batam memanfaatkan kerjasama dengan pelaku usaha dengan membuka sentra oleh-oleh Kota Batam di salah satu Pusat Perbelanjaan. Sentra ini diisi dengan berbagai macam produk IKM antara lain, makanan, kain dan fashion, dan kerajinan lainnya yang masih terus dikembangkan pada tahun 2023 ini.

Pada tahun 2022 untuk Indikator Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif dari target 76,07% terealisasi 100% dengan capaian 131,46% dari target yang diperjanjikan, dan pada tahun 2023 dengan target 78,07% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya adalah 128,09%, terjadi penurunan yang dikarenakan beberapa kebijakan yang disesuaikan sehingga mempengaruhi kinerja. Adapun beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat antara lain:

1. Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional;
2. Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan;
3. Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan;
4. Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.
5. Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam;
6. IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan;

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata
2. Adanya dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI dalam pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Kota Batam.
3. Terbangunnya jaringan kerjasama pelaku usaha dan Pemerintah, sehingga memungkinkan pertumbuhan klaster kreatif untuk mengembangkan usaha IKM.
4. Fasilitasi untuk promosi komoditi utama ekspor dengan melakukan peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi dagang dan peningkatan citra produk ekspor
5. Pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi.

## Gambar

Dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI  
Dengan Pelaksanaan Workshop KaTa Kreatif di Kota Batam



**Sumber:** Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan Pendampingan pengembangan usaha;
2. Penyelenggaraan Awarding Program;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi komoditas tertentu yang tidak efisien;
4. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
5. Membangun sistem aplikasi jaringan perdagangan;

6. Melakukan pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi;
7. Berupaya menghubungkan IKM ke dalam rantai pasok industri di Kota Batam didukung dengan regulasi;
8. Mendorong IKM agar terkoneksi ke dalam e-commerce.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif ini adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.553.430.150,-	4.035.285.618,-	72,66

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	90.943.000,-	76.576.580,-	84,20
2.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	406.770.000,-	393.057.358,-	96,63
3.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.400.239.392,-	1.339.733.000,-	95,68
Total		1.897.952.392,-	1.809.366.938,-	95,33

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.178.863.060,-	3.227.675.200,-	77,24
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	705.650.000	678.875.000,-	96,21
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.910.696.910,-	1.357.800.880,-	71,06
Total		6.795.209.970,-	5.264.351.080,-	77,47

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

### 3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	65,11	68,66	105,45	84,46	81,29
2023	69,40	71,44	102,94		84,58

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan ini adalah perwujudan dalam pokok visi “bandar dunia” yang diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis

di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*" serta mewujudkan misi Kota Batam dalam mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Realisasi kinerja atas indikator "Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan" adalah sebesar 71,44% dengan persentase capaian kinerjanya 102,94% dari target 69,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 84,46 maka capaian kinerjanya pada tahun 2023 sudah mencapai 84,58%.

Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026. Diukur dengan 6 (enam) indikator, yakni Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase pengelolaan sampah, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan. Untuk melihat capaian kinerja per indikator dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel**  
**Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota**  
**Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam**  
**Serta Berwawasan Lingkungan**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	76,92%	87,81%	114,16	82,42	88,83	107,78	100%	88,83
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50	67,60	97,27%	70	67,34	96,20	71,50	94,18
3	Persentase pengelolaan sampah	59,25%	75,37%	127,21%	61,75	76,87	124,49	71,25%	107,89
4	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	56	56	100%	62,25	62,25	100	95%	65,53
5	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	51	50	98,04%	58	50	86,21	74%	67,57
6	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	78	79,07	101,37%	82	83,36	101,66	95%	87,75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		106,34%			102,72%			-	-

**Sumber:** Bapelitbangda Kota Batam

**1. Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital**

Realisasi kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 88,83 dari target 84,42 yang direncanakan pada tahun 2023 sehingga capaian kinerjanya adalah 107,78%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 100% maka capaian kinerjanya pada tahun 2023 sudah mencapai 88,83%.

Indikator Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital ini adalah cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan yang digunakan. Tingginya investasi yang masuk di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif.

Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis Kabupaten/Kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi.

Kegiatan dokumen Inventarisasi Usulan Revisi Perwako RDTR dan Perda RTRW Kota Batam dilakukan sebagai Upaya untuk mengidentifikasi acuan dalam peninjauan Kembali dokumen Rencana Tata Ruang di Kota Batam beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya Pendampingan Penetapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Preiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun, Pendampingan Kegiatan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam, Pendampingan Kegiatan Penetapan Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Harmonisasi Kegiatan Monev Penataan Pemanfaatan Ruang, Harmonisasi terhadap penyesuaian perizinan PKKPR yang terbit di Kota Batam dan Harmonisasi Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut, berikut daftar dokumen Tata Ruang dan Keseuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai dengan Desember 2023:

**Tabel**  
Rekapitulasi Dokumen tata Ruang Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Dokumen
1.	Dokumen Inventarisasi Usulan Revisi Perwako RDTR dan Perda RTRW Kora Batam	1 dokumen
2.	Pemenuhan Administrasi untuk Dokumen Perizinan	1 dokumen
3.	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Bengkong	1 dokumen
4.	Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR berusaha dan non berusaha	503 dokumen
Jumlah		506 dokumen

*Sumber: Dinas CKTR Kota Batam*

Namun, dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat dalam pencapaiannya. Berikut sebagai faktor penghambat capaian kinerja:

1. Tingginya perubahan alih fungsi lahan.
2. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk bekerja secara professional di bidangnya secara utuh (teknis dan administratif).
3. Adanya kendala dalam penyediaan lahan.
4. Adanya kendala dalam penghapusan asset sehingga memperpanjang proses pelaksanaan.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan pihak legislatif dalam penetapan RTRW Kota Batam.
2. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana publik dan masyarakat umum menjadi lebih representatif.
3. Adanya komitmen antar personil yang terlibat untuk bersama-sama mencapai target yang sudah ditetapkan.
4. Adanya ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dan peningkatan bangunan/ gedung pemerintah dan masyarakat dapat segera dilakukan.
5. Dukungan koordinasi dan konsultasi oleh Pemerintah Pusat dalam proses penyusunan RTRW dan RDTR Kota Batam.

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan Bangunan dan Menara dilakukan secara kontinyu guna membangun kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang dan PBG (Pesetujuan Bangunan Gedung).
2. Optimalisasi verifikasi izin pemanfaatan ruang.

## 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota menggunakan rumus  $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ , dimana IKL adalah komposit Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Berdasarkan perhitungan akan diperoleh kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

**Tabel**  
Nilai IKLH dan Kategori

No.	Nilai IKLH	Kategori
1.	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
2.	$70 \leq x < 90$	Baik
3.	$50 \leq x < 70$	Sedang
4.	$25 \leq x < 50$	Kurang
5.	$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber: Permen. LH dan Kehutanan RI No. 27 Tahun 2021

Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Indikator ini berupa indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Pengukuran Indeks Kualitas Air mengacu pada Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air (dengan tujuh parameter kunci: TSS, BOD-5, COD, DO, Sulfat, Feal Coli dan Total Coliform). Pada tahun 2023 ini, IKA Kota Batam 52,00.

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam tahun 2023 dihitung dengan metode passive sampler yang terdiri atas 3 (tiga) sumber data pemantauan yaitu :

1. Data pemantauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebanyak 5 (lima) kali pemantauan dalam satu tahun
2. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 1 (satu) kali pemantauan dalam satu tahun
3. Data Pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, sebanyak 2 (dua) kali pemantauan dalam satu tahun.

Langkah - langkah menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU):

1. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), Industri (B), pemukiman/perumahan (C1) dan komersial/perkantoran/perdagangan (C2);
  2. Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan;
  3. Menghitung Indeks Ieu dari rerata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>, yakni rerata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> Kota Batam dibandingkan terhadap baku mutu masing-masing parameter, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan.
  4. Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKLH.
- Dari pendataan tersebut tercatat IKU Kota Batam mencapai 84,12.

Sedangkan Nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti dengan metode pendekatan penghitungan ITH sebagai berikut:

1. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan minimal 30% pada daerah aliran sungai dan/atau pulau.

2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan tutupan lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng lebih dari 25%. Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng lebih dari 25%, pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu. Sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.
3. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, minimal 30% peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota (minimal 10% dari luas perkotaan), kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.
4. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis tutupan lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau.

Dengan pendekatan yang dilakukan, berdasarkan data di atas, nilai indikator Indeks Tutupan Hutan yang ditindaklanjuti mencapai 62,64; Indikator Indeks Kualitas Udara yang ditindaklanjuti mencapai 84,12; dan Indikator Indeks Kualitas Air yang ditindaklanjuti mencapai 52,00. maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut:  $(0,376 \times 52,00) + (0,405 \times 84,12) + (0,219 \times 62,64) = 19,552 + 34,069 + 13,718 = 67,34$  maka nilai IKL kota Batam tahun 2023 adalah 67,34. Realisasi kinerja nyata pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan terhadap target sebesar 70,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian ini tidak mencapai target dengan persentase capaian kerjanya adalah 96,20%. Sebagai tahun kedua, bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 97,27% mengalami sedikit penurunan. Namun terhadap target capaian IKLH di akhir masa RPJMD Kota Batam yaitu di tahun 2026 sudah mencapai 94,18% dari target 71,50%.

Namun dengan pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

1. Tidak ada foto udara terupdate yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
2. Meningkatnya laju pertumbuhan pembukaan lahan dalam pembangunan
3. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait (eksternal) mengenai pengelolaan lingkungan.
4. Kurangnya data base dan lemahnya pengelolaan data base tentang pengelolaan lingkungan, sehingga menyulitkan dalam pengambilan kebijakan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja karena adanya sinergi dengan stakeholder dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal mengenai pengelolaan lingkungan.
2. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan peranan masyarakat umum dan pelaku usaha terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup melalui sosialisasi dan penyuluhan.
4. Menciptakan metode pembangunan yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan ketaatan masyarakat umum dan pelaku usaha terhadap hukum/ peraturan perundangan di bidang lingkungan melalui upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi.
6. Meningkatkan database terkait Lingkungan Hidup

7. Perlu dibuat regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan RTH dan peningkatan luasannya untuk mencapai proporsi ideal.

Sesuai indeks kualitas tutupan lahan, bahwa kualitas lingkungan hidup juga ditentukan dari kelayakan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Salah satu kriteria ruang kota yang nyaman adalah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Karakteristik fisik kota Batam dilihat dari letak geografis berada di lembah/cekungan dengan potensi pencemaran udara cukup tinggi sebagai akibat sirkulasi udara yang terpusat dan terakumulasi akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Perkembangan Kota Batam yang pesat dalam berbagai sektor telah menyebabkan adanya perubahan tata ruang kota dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota, perlu adanya keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau secara proporsional.

RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. RTH ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Batam, termasuk

penataan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial dan estetika kota sehingga dalam penataan maupun pengelolaannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kota yang representatif dan mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan sehingga dapat meningkatkan "nilai jual" Kota Batam. Kota Batam dengan luas 103.374 Ha (sesuai RTRW Kota Batam 2021-2026) sampai tahun 2023 luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola adalah 3.088.782,23 m<sup>2</sup> (data RTH Dinas Perakimtan) yang terdiri dari 183 lokasi dengan sebaran RTH berikut:

**Tabel**

Lokasi RTH Kota Batam pada Tahun 2023

RTH	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah Lokasi
RTH Pemeliharaan Taman Kota	176.052,23	59
RTH Jalan (Jalur jalan sebelah dalam jalan Utama)	1.668.403	120
RTH Kebun Raya Batam	856.600	Dari 85,6 ha luas administrasi kebun raya, seluas 29 ha yang sudah dibuka dalam kondisi terpelihara
RTH Pemakaman	387.727	3
Total	3.088.782,23	183

**Sumber:** Disperakimtan Kota Batam

Keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/penurunan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

1. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain.
2. Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik maupun privat.
3. Pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder.
4. Melaksanakan peralihan PSU Perumahan dari Pengembang menjadi Aset Pemerintah Kota Batam

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran adalah, antara lain:

1. Keterbatasan lahan untuk RTH yang tersedia di Kota Batam.
2. Masih banyak Pengembang Perumahan yang belum melakukan serah terima PSU ke Pemerintah Kota Batam.
3. Peran serta swasta belum maksimal dalam peningkatan kualitas RTH publik.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/ rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH.
2. Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
4. Melakukan inventarisasi lokasi pengadaan lahan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Batam yang akan berdampak positif dalam penambahan luasan RTH.

### **3. Persentase pengelolaan sampah**

Persentase pengelolaan sampah adalah cakupan pelayanan persampahan dengan gambaran banyaknya sampah/tonase sampah

yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan layanan pengelolaan sampah merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Batam dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Batam (ton/tahun).

Persentase pengelolaan sampah ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Batam telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan layanan pengelolaan sampah harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa ceceran sampah di seluruh wilayah Kota Batam. Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Batam adalah perbandingan volume sampah yang ditangani dengan timbunan sampah. Target Persentase pengelolaan sampah pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 71,25%. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah.

Realisasi kinerja nyata indikator Persentase Pengelolaan Sampah pada tahun 2023 adalah sebesar 76,87% dari target sebesar 61,75% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 124,49%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Dengan capaian kinerja indikator Persentase pengelolaan sampah sebesar 127,21% pada tahun 2022, tahun ini mengalami penurunan dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam maka capaian kinerjanya sudah melebihi target karna sudah mencapai 107,89%.

Namun dengan pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

- a. Pengangkutan sampah yang masih dicampur
- b. Belum tersedianya sarana untuk pengelolaan sampah secara terpisah

- c. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait (eksternal) mengenai pengelolaan lingkungan
- d. Kurangnya data base dan lemahnya pengelolaan data base tentang pengelolaan lingkungan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri serta turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Kurangnya edukasi dalam pengelompokan sampah terutama limbah rumah tangga

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pihak kecamatan tidak hanya DLH.
- b. Adanya program Bank Sampah

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan program penyuluhan lingkungan hidup terhadap masyarakat
- b. Mengurangi timbunan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan
- c. Membudayakan pemilahan sampah di masyarakat.

### **Gambar**

Workshop Pengelolaan Sampah



*Sumber: DLH Kota Batam*

**Gambar**  
**Bank Sampah Kota Batam**



**Sumber:** DLH Kota Batam

#### 4. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Pada indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap dan penanggulangan 42 titik banjir dalam wilayah perkotaan di Kota Batam. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun pertama RPJMD Kota Batam 2021-2026, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel  
Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap	88	88	100	88,5	88,5	100
2	penanggulangan 42 titik banjir	24	24	100	36	36	100
Rata-rata Capaian		100			100		

**Sumber:** Bapelitbangda Kota Batam

##### a. Cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Sampai dengan tahun 2023 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam telah melakukan 60% dari kebutuhan penanganan jalan Kota Batam pada periode RPJMD Kota Batam 2021-2026. Penanganan Jalan Kota Batam yang telah dilakukan pada tahun 2023 antara lain: pembangunan jalan sepanjang 4,37 km, pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 5,82 km, rekonstruksi jalan sepanjang 7,58 km, dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 30 km. Penanganan jalan Kota Batam ini juga didukung oleh penanganan Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Batam sebanyak 16.178 tiang.

Capaian kinerja nyata indikator cakupan pemenuhan jalan dalam kondisi mantap adalah sebesar 88,5% dari target sebesar 88,5% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Sebagai tahun kedua, capaian tahun ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.

Faktor pendukung pencapaian aspek kualitas/kondisi infrastruktur jalan antara lain adalah:

1. Adanya akselesari pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam dengan BP Batam
2. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2022
3. Sebagai prioritas pembangunan pemerintah Kota Batam yang tertuang didalam RPJMD Kota Batam
4. Telah berjalannya pemeliharaan rutin jalan melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan

### **Gambar**

Kondisi ruas jalan di Kota Batam



*Sumber: DBMSDA Kota Batam*

Sedangkan faktor penghambat aspek kualitas/kondisi infrastruktur jalan antara lain adalah:

1. Ketersediaan lahan dalam mendukung pembangunan infrastruktur PU.
2. Masih kurangnya kematangan perencanaan terkait koordinasi antar stakeholder.

Beberapa solusi yang dapat diupayakan serta rekomendasi dalam rangka mendukung tercapainya aspek pencapaian aspek kualitas/kondisi infrastruktur jalan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder yang berkaitan dengan penyiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya meningkatkan kematangan perencanaan proyek.
3. Meningkatkan kinerja pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan- jalan dalam kondisi sudah mantap
4. Verifikasi dan monitoring sebelum perencanaan infrastruktur ditetapkan terkait ketersediaan lahan dan kondisi lapangan.

### **Gambar**

Pemeliharaan rutin jalan di Kota Batam



**Sumber:** DBMSDA Kota Batam

**b. Penanggulangan 42 titik banjir**

Capaian kinerja nyata indikator Penanggulangan 42 titik banjir adalah sebesar 36% dari target sebesar 36% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan namun penanganan terhadap titik banjir terus meningkat. Menurut Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Yang disebut genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam.

Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan permasalahan genangan adalah:

1. Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan.
2. Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air terhambat.
3. Adanya pembangunan di wilayah yang tadinya area resapan air serta di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran.
4. banyak titik banjir yang sering terjadi karena lokasinya berdekatan dengan laut. Sehingga ketika hujan tiba air laut juga pasang menyebabkan banjir.

Sedangkan faktor pendukung dalam penanganan permasalahan genangan adalah :

1. Berjalannya pemeliharaan sungai dan saluran melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuat sumur resapan dalam rangka mengurangi limpasan air hujan, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan pembuatan drum pori di lingkungan pemukiman dan perkantoran.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga daerah resapan air, didukung oleh edukasi dari Dinas dengan gerakan menanam pohon di kawasan hulu.

**Gambar**  
Pemeliharaan Drainase Kota Batam



**Sumber:** DBMSDA Kota Batam

Solusi atau upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan lama genangan adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi dengan membersihkan aliran drainase yang tersumbat dari sampah-sampah dan tanah maupun membersihkan jalan-jalan dari sisa endapan lumpur.
2. Pembangunan drainase induk yang dibangun secara bertahap.
3. Melakukan rehabilitasi tanggul sungai dan saluran
4. menambah ruang aliran air ke gorong-gorong
5. Upaya inovasi dengan pendekatan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui edukasi untuk giat menanam, membuat sumur resapan dan tidak membuang sampah ke sungai/saluran

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran “lama genangan yang tertangani pada titik genangan”, maka direkomendasikan agar Pemerintah Kota Batam lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor karena masalah genangan ini tidak semata-mata diakibatkan oleh rendahnya kapasitas saluran (masalah infrastruktur), tetapi juga karena faktor-faktor lain seperti persampahan, perilaku masyarakat dan rendahnya resapan air hujan.

**Gambar**  
Pembersihan Sampah Di Saluran



*Sumber: DLH Kota Batam*

## **5. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan**

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan Kota Batam adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah perkotaan di Kota Batam. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan ini adalah sebesar 50% dari target sebesar 58% yang direncanakan pada tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 86,21%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 74% maka capaian kinerjanya mencapai 67,57 %.

Dengan data capaian di atas, target diketahui jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dapat dibangun hanya sebanyak 90 Unit. Hal ini disebabkan ada beberapa penyesuaian anggaran akibat masih banyaknya ruas-ruas jalan di Kota Batam yang masih dalam tahap peningkatan/pelebaran, namun kedepannya Dinas Perhubungan Kota Batam akan rutin berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan terhadap sarana dan prasarana Perhubungan untuk menunjang keselamatan dapat tersedia sebagaimana yang sudah dianggarkan.

Faktor Pendukung yang menjadi penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Dukungan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengembangan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Dukungan pemerintah pusat dengan berbagai kebijakan terkait skema pendanaan dalam pengembangan infrastruktur tidak hanya mengandalkan Dana Pemerintah Daerah saja, bisa melibatkan pihak swasta.
3. Adanya inovasi dalam pengembangan transportasi.

**Gambar**  
Pembangunan Transfer Point di Kota Batam



*Sumber: Dishub Kota Batam*

**Gambar**  
Peluncuran Unit Bus Trans dengan Pola Buy To Service (BTS)



*Sumber: Dishub Kota Batam*

## **6. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Batam. Masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat menyebabkan sejumlah penduduk Kota Batam tidak mampu memiliki rumah yang layak dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang tinggal pada rumah dengan kondisi kurang layak atau kurang sehat bahkan tidak sedikit yang tinggal pada permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melaksanakan fasilitasi kebutuhan hunian bagi masyarakat kurang mampu serta mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel  
Pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur  
Permukiman Perkotaan Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	89,50	89,50	100%
2	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	81,00	81,00	100%
3	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	59,53	65,60	110,33%
4	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	97,02%	97,02%%	100%

**Sumber:** Data Perakimtan Kota Batam

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan tahun 2023 yang tercapai 101,66% dengan realisasi 83,36% dari target 82%.

### 1. Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek permukiman kumuh, yakni

- a. Kondisi Bangunan Gedung, meliputi:
  - Ketidakteraturan bangunan;
  - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- b. Kondisi Jalan Lingkungan, meliputi:
  - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
  - Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- c. Kondisi Penyediaan Air Minum, meliputi:
  - Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
  - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- d. Kondisi Drainase Lingkungan, meliputi:
  - Drainase lingkungan tidak tersedia;
  - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
  - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah, meliputi:
  - Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- f. Kondisi Pengelolaan Persampahan, meliputi:
  - Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
  - Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran.
  - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
  - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- g. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019 adalah 738,85 Ha yang dijadikan basis data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 139,28 Hektar, 2021 sebesar 140,36 Ha, 2022 sebesar 119,45 Ha dan tahun 2023 sebesar 86,16 Ha. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2023, target penanganan kumuh sebesar 59,53% dengan realisasi mencapai 65,68%.

Apabila dilihat dari realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat selisih penanganan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 tingkat partisipasi/investasi dalam program penanganan kumuh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang terdata dilaksanakan di wilayah kota batam, sedangkan kontribusi APBN tahun 2022 tidak ada alokasi. Perumusan capaian yang dilaksanakan disesuaikan dengan realisasi berdasarkan aspek penanganan kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Dinas Perakimtan Kota Batam 52 | Page Satker KOTAKU dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak terkendalinya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kesulitan penataan baik perumahan maupun lingkungan permukiman sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman serta jaringan jalan lingkungan yang kurang aksesibel di wilayah perkotaan.
2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah perkotaan perkotaan.
3. Pesatnya arus urbanisasi sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman lebih merata di wilayah perkotaan.

4. Tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman di wilayah perkotaan.

Rekomendasi untuk pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
2. Mencari terobosan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Batam terkait lahan- lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
3. Pemerintah Kota perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun Pemerintah Kota.
5. Pemerintah Kota harus memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan.

Selain persentase luasan kawasan kumuh, persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak pun menjadi faktor pendukung dalam indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan. Berdasarkan Undang--Undang (UU) Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat menyebabkan sejumlah penduduk Kota Batam tidak mampu memiliki rumah yang layak dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melaksanakan fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang mampu serta mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki secara swadaya dan telah berpindah tangan, sehingga tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan.
2. Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun masih terkendala;
3. Meningkatnya jumlah penduduk didaerah perkotaan yang membutuhkan akses perumahan
4. Adanya aglomerasi yang terjadi di kawasan-kawasan industri sehingga adanya pembangunan rumah liar dan tidak layak yang menimbulkan perluasan kawasan kumuh
5. Database Rumah Tidak Layak Huni datanya masih ada calon penerima yang belum memenuhi kriteria
6. Status Kepemilikan Lahan untuk pengembangan infrastruktur permukiman yang belum jelas

Solusi/rekomendasi untuk mencapai sasaran adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat. Implementasi kebijakan strategis untuk mengurangi luasan kumuh pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Perlu melakukan validasi data BDT terkait data penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria penyaluran bantuan RTLH berdasarkan kriteria baku;
2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD (APBN, PPP, CSR);
3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur;
4. Meningkatkan koordinasi dengan BP Batam dan Kantor pertanahan untuk menyediakan lahan pembangunan Rumah Susun;
5. Mengembangkan pembangunan perumahan secara vertikal untuk ketersediaan lahan yang terbatas pada kawasan yang padat penduduk
6. Pembangunan rusunawa dan rusunami di kawasan-kawasan industri agar terpenuhi infrastruktur permukiman bagi tenaga kerja
7. Perbaikan database untuk Calon Penerima Rumah Tidak Layak Huni
8. Proses verifikasi dan monitoring lahan pada saat perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman perlu dilakukan

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.773.407.380,-	1.508.069.886,-	54,38

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	352.974.000,-	228.280.426,-	64,67
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	370.391.797,-	289.227.911,-	78,09
3.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	115.412.000,-	110.037.110,-	95,34
4.	Pengelolaan Persampahan	80.648.125.963,-	75.414.315.380,-	93,51
	Total	81.486.903.760,-	76.041.860.827,-	93,32

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Keanakeragaman Hayati (KEHATI)	18.037.560.331,-	13.377.439.211,-	74,16

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

4. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.960.326.960,-	11.905.265.237,-	91,86
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	19.302.951.008,-	13.345.124.452,-	69,14
3.	Penyelenggaraan Jalan	106.058.815.925,-	65.767.609.848,-	62,01
4.	Pengembangan Jasa Kontruksi	240.729.840,-	156.461.543,-	64,99
Total		138.562.823.733,-	91.174.461.080,-	65,80

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

5. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	37.289.222.260,-	32.207.888.260,-	86,73

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

## 4. Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera

Realisasi kinerja nyata indikator Sasaran Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Tahun 2023 diukur dengan 2 (dua) indikator “Indeks Pembangunan Manusia” dan “Persentase Penduduk Miskin” dengan capaian yang sama masing-masing sebesar 100%. Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

### Indikator Kinerja 1: Indeks Pembangunan Manusia

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	81.46	81.67	100.26	82,10	100,66
2023	81,74	82,64	101,10		100,66

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Realisasi kinerja nyata indikator “Indeks Pembangunan Manusia” adalah sebesar 82,64 dari target sebesar 81,74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan persentase capaian kinerjanya adalah 101,10%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Sebagai tahun kedua RPJMD, capaian kinerja sasaran “Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera” tahun ini adalah sebesar 97,26%, namun bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam maka capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikatornya sudah mencapai 100,66% pada Indeks Pembangunan Manusia dan 107,96% pada Persentase Penduduk

Miskin. Dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026, Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan 6 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini. Rincian capaian kinerja per indikator tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel  
Capaian Indikator Pemenuhan Kinerja Sasaran  
pada Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam  
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Indeks pendidikan	73,81	73,72	100	73,87	74,36	100,66	74,05%	100,42
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	12	67,35	561,25	15	65,80	438,67	35%	188,00
3	Indeks Kesehatan	82,19	82,49	100,37	82,26	82,49	100,28	82,47	100,02
4	Indeks Pengeluaran	90,06	90,06	100	91,11	90,98	99,86	93,38	97,43
5	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	7,64	7,84	103	8,64	13,17	152,43	11,64%	113,14
6	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	12,50%	12,50	100	14,3	38,80	271,33	25%	155,20
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		177,37			193,87			-	-

**Sumber:** Bapelitbangda Kota Batam

## 1. Indeks Pendidikan

Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Rata-rata lama Sekolah dan Angka Melek Huruf yang sebutannya telah diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

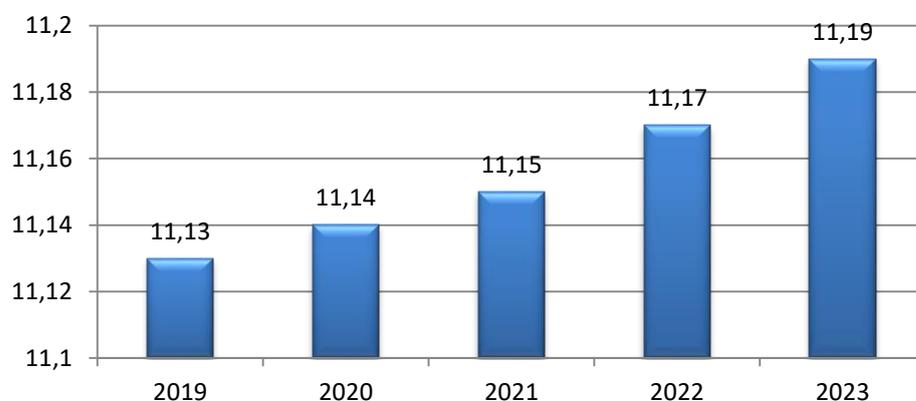
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 11,19 meningkat 0,02 poin dari capaian tahun 2022 sebesar 11,17. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Batam rata-rata pendidikannya pada tingkat SMA/K Kelas 2 semester 2. Berikut tabel dan grafik perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Batam  
Tahun 2019 - 2023

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	11,13	11,14	11,15	11,17	11,19

**Sumber:** Data BPS Kota Batam

Grafik  
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Batam  
Tahun 2019-2023



**Sumber:** Data BPS Kota Batam

Implementasi kebijakan strategis meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2023 diharapkan memberikan dampak semakin meningkatnya kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan, serta angka melanjutkan pendidikan.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana sekolah masih belum sesuai standar
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak
3. Masih ada pendidik dengan kompetensi yang tidak sesuai standar.

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan (usia sekolah 7-12 tahun).
3. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas.

Adapun upaya dan solusi serta rekomendasi untuk mendorong pencapaian kinerja dengan meningkatkan mutu dan manajemen sekolah.

- **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian. Adapun angka harapan lama sekolah di Kota Batam dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

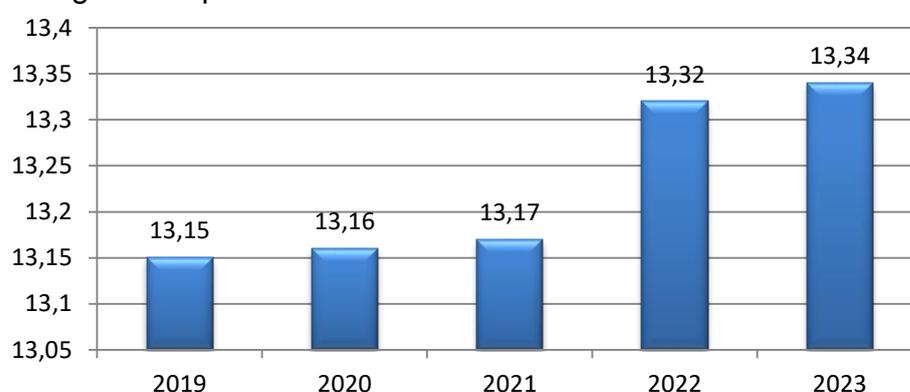
Tabel  
 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Batam  
 Tahun 2019 – 2023

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,15	13,16	13,17	13,32	13,34

**Sumber:** Data BPS Kota Batam

**Grafik**

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Batam tahun 2019-2023



**Sumber:** Data BPS Kota Batam

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan anak-anak yang pada 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,34 tahun hal ini dianggap anak-anak berusia 7 tahun dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi hingga Diploma II. Angka HLS 13 tahun ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun terutama untuk jenjang sekolah dasar namun dengan semakin tingginya HLS ini juga maka pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

Gambar  
Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar



*Sumber: Disdik Kota Batam*

Gambar  
Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



*Sumber: Disdik Kota Batam*

## **2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Rata-rata aktivitas membaca masyarakat diukur oleh 5 indikator:

1. Frekuensi membaca per minggu
2. Durasi/intensitas membaca per hari
3. Jumlah bacaan per triwulan (3 bulan terakhir)
4. Frekuensi mengakses internet
5. Durasi/intensitas mengakses internet

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi gadget tidak terlalu dimanfaatkan untuk kemudahan akses terhadap buku-buku secara online, namun lebih kepada pemanfaatan media sosial dan permainan.
2. Dukungan sarana dan prasarana di setiap kecamatan belum memadai

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Budaya Gemar Membaca yang terus dilakukan sampai ke tingkat kelurahan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat sehingga dapat menjadi garda terdepan dalam mengembangkan minat baca baik dilingkungan sekitarnya.
2. Mengalakkan program Bunda Bertutur sebagai salah satu upaya dari lingkungan terdekat bagi anak-anak usia dini untuk menumbuhkan gemar membaca.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah koleksi buku baik secara fisik maupun buku digital di Perpustakaan Umum Kota Batam

2. Kerjasama dengan pihak swasta melalui dukungan dana CSR terhadap pembangunan perpustakaan disetiap kecamatan
3. Melakukan inovasi dalam pengelolaan perpustakaan Kota Batam

Gambar

Sosialisasi Budaya Gemar Membaca Tahun 2023



*Sumber: Dispussip Kota Batam*

Gambar

pelaksanaan kegiatan bunda bertutur untuk meningkatkan minat membaca pada anak sejak usia dini



*Sumber: Dispussip Kota Batam*

### 3. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). UHH adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

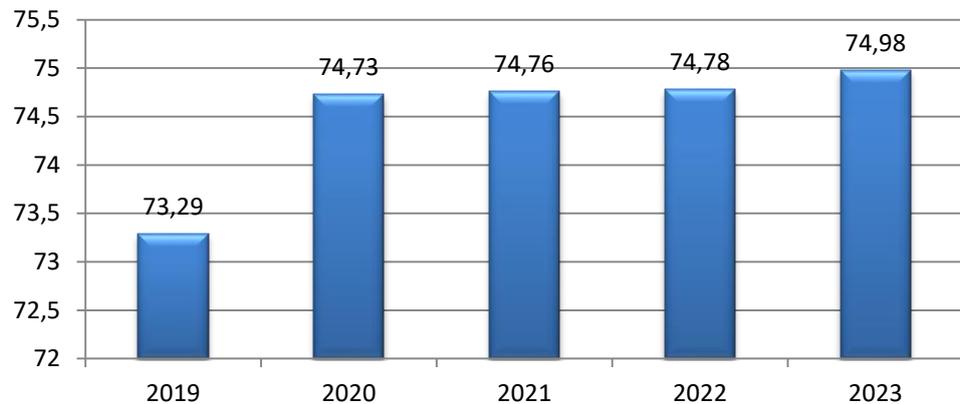
Capaian Kinerja nyata UHH Kota Batam pada tahun 2023 adalah sebesar 74,98 tahun. Terus meningkat dari tahun ke tahun, adapun perkembangan capaian UHH di Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel  
Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Batam tahun 2019 - 2023

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH)	73,29	74,73	74,76	74,78	74,98

**Sumber:** Data BPS Kota Batam

Grafik  
Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Batam tahun 2019 – 2023



**Sumber:** Data BPS Kota Batam

UHH 74,98 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 74,98 tahun. Faktor pendorong tercapainya UHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan masyarakat terhadap penyuluhan tenaga kesehatan;
2. Dukungan jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan.

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar di tahun-tahun mendatang angka harapan hidup meningkat, maka pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat perlu bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan daya beli masyarakat
3. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan,
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori,
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Namun, dalam pencapaian kinerja ada faktor yang menjadi penghambat, yakni sebagai berikut :

1. Prasarana kesehatan yang belum memadai untuk setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Tenaga Kesehatan belum tersebar secara merata di setiap Puskesmas

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja antara lain karena meningkatnya akses kesehatan melalui penambahan sarana kesehatan di setiap kecamatan

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menambah tenaga kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh setiap puskesmas
2. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan
3. Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah untuk keluarga tidak mampu

#### **4. Indeks Pengeluaran**

Indeks Pengeluaran adalah indeks yang membandingkan antara nilai pengeluaran per kapita Kota Batam dengan nilai pengeluaran per kapita minimum dan maksimum di Indonesia. Indeks pengeluaran merupakan salah satu komponen pendukung capaian IPM Kota Batam sebagai wujud dari Standar Hidup Layak, beberapa faktor yang mendorong meningkatnya pengeluaran per kapita diantaranya adalah bertambahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kebutuhan dan tingkat inflasi. Bertambahnya pendapatan akan mendorong kemampuan daya beli yang akan menstimulasi peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi pokok yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan pangan. Harga bahan pangan dipengaruhi ketersediaan barang atau keseimbangan tingkat permintaan dan penawaran. Bila terjadi kesenjangan antara tingkat permintaan dan penawaran maka akan mengakibatkan inflasi harga barang. Semakin tinggi kesenjangan maka akan semakin tinggi tingkat

inflasi yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berakibat pada bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk memberi barang-barang yang dibutuhkannya. Nilai Pengeluaran per kapita Kota Batam pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 18.900/orang/tahun. Terus meningkat dari tahun ke tahun, perkembangan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

### Tabel

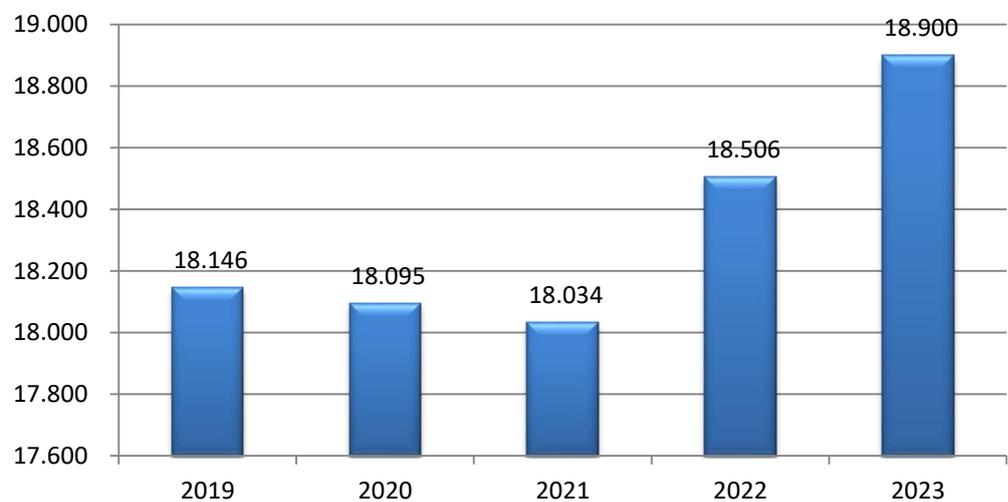
Nilai Pengeluaran per kapita Kota Batam tahun 2019 – 2023

Standar Hidup Layak						
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/ Orang/Tahun	18,146	18,095	18,034	18,506	18,900

**Sumber:** Data BPS Kota Batam

### Grafik

Nilai Pengeluaran per kapita Kota Batam tahun 2019 – 2023



**Sumber:** Data BPS Kota Batam

Adapun salah satu faktor penghambat dalam pencapaian kinerja karena tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Menyediakan lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang berkerja sehingga meningkat daya belinya.
2. Memperbanyak produksi industri kecil dan mikro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Solusi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjamin keberlangsungan penyediaan barang ataupun jasa untuk meningkat daya beli masyarakat.
2. Menciptakan ide-ide baru untuk menumbuhkan wirausaha baru.

#### **5. Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan**

Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan ini adalah sebesar 13,17% dari target sebesar 8,64% yang direncanakan pada tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 152,43%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 102,62%, mengalami kenaikan sebesar 49,81% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 11,64% maka capaian kinerjanya mencapai 113,14%.

Pencapaian dilakukan dengan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan melalui kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah

kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Dalam pembinaan prestasi olahraga diketahui cabang olahraga pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel  
Cabang Olahraga Berprestasi Kota Batam Tahun 2023

No.	Cabang Olahraga	Nomor/Kategori/Kelas
1	KARATE	Kelas JUNIOR 66 kg, (PI) Thailand OPEN Karate Championship
2	BULU TANGKIS	Tunggal Putri Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Ganda Putri Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Beregu Putri Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
3	SKI AIR	Single Putra WB Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Single Putra WS Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		TIM Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Single Putri WS Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Tim WS Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Tim BW Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
4	BOLING	Kelas Disabilitas PEPARPENAS X
5	RENANG	PEPARPENAS X/2023 Gaya Kupu - Kupu
		PEPARPENAS X/2023 Gaya Dada
		Gaya Bebas PORWIL XI
6	BELA DIRI	Daeryun U72 kg Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Class Under 78 kg Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
7	DANCE	Kategori Standart Balroom dan Couple Dance Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Breaking Dance Prakulifikasi PON 2023/PON 2024

8	BOLA VOLI	Kejurda Voly Pelajar Gubernur Kepri
9	PENCAK SILAT	Kelas A (PI) POPNAS
		Putra Tunnggal Pool A Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Putri F Pool A Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
10	ATLETIK	Kelas 100 M Putra Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		Kelas 200 M Putra Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		Kelas 100 M Putri Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		Kelas 200 M Putri Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		Lempar Lembing Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		Tolak Peluru Kejuaraan Atletik Pelajar Prov. Kepri
		Kelas 10 KM PORWIL XI
11	SELAM	Upnea 50 M Monofin Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		200 M Surface Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
12	TINJU	Kelas 54 kg PA POPNAS
		Kelas 57 Kg PA POPNAS
		Kelas 54 Kg PI POPNAS
		Kelas 60 Kg PUTRI Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Kelas 54 kg putra Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
13	CATUR	Kelas Kilat dan Catur Cepat, Catur Standar PORWIL XI
		(Beregu) Kelas Kilat PORWIL XI
14	TAKRAW	Beregu PORWIL XI
15	GULAT	Kejurnas Gulat U-20 di Jakarta / Gaya Greco Roman 63 Kg Mens
		Kelas 86 KG Gaya Bebas Prakulifikasi PON 2023/PON 2024

16	JUJITSU	Kelas Newaza 62 KG Putra Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Kelas Fighting System 77 KG Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		World Cup Contact Jiu jit-Su Thailand / 77 Kg Mens
17	KICK BOXING	Sea Games XXXII Tahun 2023 Kamboja / K-1 / 67 Kg Mens
		Kelas 56 Kg Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Kelas 48 Kg Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Kelas 51 Kg Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
18	MENEMBAK	Nomor Air Rifle
19	PANAHAN	U-15 Batam Kejurnas Junior
		Devisi Compon Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Devisi Recurve Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
		Standar Nasional Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
20	SEPEDA	Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
21	TAEKWONDO	Prakulifikasi PON 2023/PON 2024
22	WUSHU	Kelas 45 kg POPNAS

**Sumber:** *Dispora Kota Batam*

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang bertaraf nasional dan internasional.
2. Rendahnya koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Badan Pertanahan Daerah untuk memperoleh lahan bagi pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Batam.
2. Membuat database kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berwirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

#### **6. Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran**

Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran adalah menurunnya tingkat angka kejadian konflik sosial dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran ini adalah sebesar 38,80% dari target sebesar 14,30% yang direncanakan pada tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 271,33%%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam 25% maka capaian kerjanya mencapai 155,20%.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah tingkat heterogenitas suku dan ras di Kota Batam yang sangat tinggi akibat daya tarik Kota Batam dan letak yang sangat strategis sehingga banyak pendatang dari daerah lain yang membuat Kota Batam sebagai miniatur Indonesia

Sedangkan faktor pendukung dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya forum kerukunan umat beragama sebagai wadah dalam menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat
2. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Forkopimda Kota Batam

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja dapat dengan meningkatkan peran dan koordinasi Forkopimda dalam menciptakan keamanan dan ketertiban

**Indikator Kinerja 2: Persentase Penduduk Miskin**

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	4.74	5.19	90.51	4,65	89,60
2023	4,69	5,02	93,43		92,63

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Untuk indikator persentase penduduk miskin ini pada tahun 2023 capaiannya adalah 93,43%, hal ini menunjukkan perlu penanganan lebih serius dan intens oleh Pemerintah Kota Batam dan bila dibandingkan terhadap target akhir RPJMD sebesar 4,65%, capaian Pemerintah Kota Batam baru mencapai 92,63%. Walaupun terendah, nyatanya ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 sebesar 5,19 kemudian menurun menjadi 5,02.

## **Penduduk Miskin**

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) Untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

## **Garis Kemiskinan (GK)**

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu bahwa terdapat beberapa kriteria seseorang dinyatakan sebagai penduduk miskin atau tidak mampu, yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;

4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang); dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Apabila mengacu pada kriteria fakir miskin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan fakir miskin bersifat multisektor yang perlu melibatkan berbagai dinas dan lembaga terkait pada bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Sebagai tahun kedua RPJMD, capaian kinerja Persentase Penduduk Miskin diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Persentase Penurunan PPKS. Adapun rincian capaian kinerja per indikator tahun 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel  
Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator Persentase Penduduk Miskin  
Kota Batam Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,20	91,5	104,93	87,60	96,86	110,57	88,50	109,45
2	Persentase Penurunan PPKS	1,55%	27,52%	1775,48	1,50	4,31	287,33	1,35	319,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		940,21%			254,24%			-	-

**Sumber:** Bapelitbangda Kota Batam

### 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 96,86% dari target sebesar 87,60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110,57%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 104,93% maka terjadi peningkatan, apabila capaian kinerja indikator bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam sebesar 88,50% maka capaian kinerjanya mencapai 109,45 %.

Pada tahun 2022 Pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 telah melemahkan berbagai sektor ekonomi yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga warga miskin yang ada di Kota Batam semakin tidak berdaya. Namun pada tahun 2023, berbagai program-program stimulus untuk masyarakat miskin terus dilakukan diantaranya sembako murah, bantuan sosial, pembangunan rumah tidak layak huni.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/ rekomendasi untuk tahun yang akan datang yaitu:

1. Lebih mengoptimalkan implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), melalui sosialisasi atau bimbingan yang lebih intensif.
2. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi dan lembaga terkait Pangan secara mandiri dan berkelanjutan dalam membangun sikap baru terhadap pangan sehat
4. Perlu dipertahankan pola konsumsi pangan lokal dengan mengurangi kebutuhan sumber pangan dari impor (berbasis gandum/terigu/kentang)
5. Penguatan konsumsi buah dan sayuran lokal dalam berbagai bentuk cara penyajian
6. Pertahankan keberadaan lahan pertanian yang ada di Kota Batam, meskipun produksinya sedikit dibandingkan kebutuhan
7. Menjamin pasokan pangan dan pengembangan kelompok pengolah pangan lokal
8. Gerakan masyarakat menuju gizi seimbang aman berbasis pangan lokal
9. Pengembangan inovasi dalam produksi pertanian serta peternakan.

Pada peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/penurunan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab. Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)
2. Adanya pengendalian dan pengawasan bibit serta ternak dari pemerintah Kota Batam
3. Dukungan dari Asosiasi yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terkait Fasilitasi Sertifikasi Halal, kurangnya pedagang unggas dan daging yang sudah mempunyai sertifikat halal dari LPPOM-MUI untuk RPH (Rumah Potong Hewan) sementara sertifikat ini menjadi salah satu syarat bagi kehalalan suatu produk olahan unggas (ayam, bebek, itik) dan olahan daging (daging sapi, domba, kambing, kerbau).
2. Pendapatan yang belum mencukupi kebutuhan tiap individu.

## **2. Persentase Penurunan PPKS**

Dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin di Kota Batam yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat selama masa pandemik, maka pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan program Bantuan Sosial non-reguler bagi warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penduduk yang terdampak yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Ekonomi, Budaya, Politik, Etnis, Agama, Penyimpangan perilaku, Hukum, industrialisasi dan urbanisasi ). Adapun luasnya wilayah Kota Batam yang merupakan daerah kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dan 64 Kelurahan. Data Tahun 2023 (DTKS) 331.829 jiwa dari sebelumnya 364.308 jiwa, artinya ada penurunan dari jumlah data yang ada.
2. Masih perlu di optimalkan kembali peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungannya dengan baik.
3. Belum adanya keseimbangan antara populasi PMKS yang harus ditangani dan dengan ketersediaan dana, hal ini mengakibatkan upaya penanganan tidak dapat dilaksanakan secara serempak, sementara

keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas tinggi, belum dapat bersinergi dengan daerah lain.

4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki baik di kalangan Legislatif, aparatur pemerintahan maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial mitra kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
  
5. Tercapainya program-program APBD II dikarenakan ada beberapa kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan atau penanaman jika ada kejadian terlebih dahulu contoh ; Kejadian bencana Alam/Sosial, Penanganan Orang Terlantar dan Penanganan Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs meninggal terlantar), sementara untuk Program Nasional melalui Program Keluarga harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Batam cukup berjalan lancar, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, dapat di koordinasikan Lintas Dinas / Lembaga sebagai pelaksana Program di Daerah.

Upaya dan solusi serta rekomendasi untuk mendorong pencapaian kinerja Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunjang dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terdapat pada Sumber Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Pendidikan	421.899.909.452,-	399.118.514.480,25	94,60
2.	Pengembangan Kurikulum	58.508.000,-	57.905.800,-	98,97
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.012.500,-	9.850.000,-	98,38
4.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	19.862.500,-	18.200.000,-	91,63
Total		88.383.000,-	85.955.800,-	97,25

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	93.819.260.952,-	73.498.289.674,60	78,34
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.172.322.750,-	1.021.401.210,-	87,13

3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	576.600.000,-	332.903.788,-	57,74
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	561.702.820,-	540.831.905,-	96,28
Total		97.474.642.852,-	76.504.852.927,60	78,49

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pembinaan Perpustakaan	529.483.050,-	483752.500,-	91,36
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	7.750.000,-	7.222.000,-	93,19
Total		537.233.060,-	490.974.500,-	91,39

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	14.573.228.504,-	13.625.297.600,-	93,50

2.	standarisasi dan perlindungan konsumen	561.702.820,-	540.831.905,-	96,28
Total		15.134.931.324,-	14.166.129.505,-	93,60

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

5. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pemberdayaan Sosial	9.432.556.000,-	8.926.435.120,-	94,63
2.	Rehabilitasi Sosial	2.662.310.000,-	2.335.366.600,-	87,72
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.084.712.045,-	846.153.500,-	78,01
4.	Penanganan Bencana	883.141.200,-	613.373.493,-	69,45
Total		14.062.719.245,-	12.721.328.713,-	90,46

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

6. Program yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setdako Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Perekonomian Dan Pembangunan	1.346.551.850,-	1.286.335.116,-	94,19

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

7. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.442.532.000,-	1.215.223.500,-	84,24
2.	Penanganan Kerawanan Pangan	35.930.000,-	15.727.000,-	43,77
3.	Pengawasan Keamanan Pangan	75.963.000,-	75.486.000,-	99,37
4.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	654.145.000,-	588.603.784,-	89,98
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	534.627.500,-	512.750.290,-	95,91
6.	Penyuluhan Pertanian	78.554.000,-	77.254.200,-	98,35
7.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.022.617.300,-	863.083.821,-	84,40
Total		3.844.368.800,-	3.348.128.595,-	87,09

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

## 5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland

Indikator Kinerja : Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland.

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	53.07	56.11	105.73	71,66	78,30
2023	59,41	67,94	114,36		94,81

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland adalah sebesar 67,94 dari target sebesar 59,41 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,36%. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Sebagai tahun kedua RPJMD, dengan capaian kinerja indikator tersebut, bila dibandingkan terhadap target akhir 2026 maka capaian kinerjanya mencapai 94,81%. Pemenuhan terhadap Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland di Kota Batam diukur melalui data realisasi pada 3 indikator berikut ini:

Tabel  
 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Pemerataan  
 Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland  
 Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah <i>hinterland</i>	41,67	45,41	108,98	55,85	76,25	136,53	77,19	98,78
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah <i>hinterland</i>	88%	84%	95.45	91	91	100	100	91
3	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah <i>hinterland</i>	29,55	36,12	122,23	31,38	36,58	116,57	37,80	96,77
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		115,60			193,87			-	-

**Sumber:** Bapelitbangda Kota Batam

**1. Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah *hinterland***

Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah *hinterland* ini adalah cakupan rumah layak huni yang dipenuhi, sarana dan prasarana utilitas yang layak, luasan wilayah yang bebas kumuh, dan peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman dalam wilayah *Hinterland* (di luar wilayah *mainland* P. Batam)

Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 76,25 dari target sebesar 55,85 yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,53%. Capaian ini melebihi target. Sebagai tahun kedua RPJMD, dengan capaian kinerja indikator tersebut, bila dibandingkan terhadap target akhir 2026 sebesar 77,19% maka capaian kinerjanya mencapai 98,78%. Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman wilayah hinterland dapat dilihat pada pencapaian indikator seperti dalam tabel di bawah ini

Tabel  
Pencapaian Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur  
Permukiman Wilayah Hinterland Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Layak Huni Wilayah Hinterland	74,00	74,00	100%
2	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	75,95	77,78	102,41%
3	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	46,85	46,85	100%
4	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	89,87	89,87	100%

**Sumber:** Dinas Perakimtan Kota Batam

Capaian pemenuhan rumah layak huni kota batam di wilayah hinterland dukung melalui pelaksanaan program kawasan permukiman di wilayah hinterland dengan sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah hinterland, namun tahun 2023 wilayah hinterland belum ada alokasi usulan yang harus ditangani karena masih dalam pendataan dan perumusan regulasi terkait status aset bangunan atas air. Sampai dengan tahun 2023 realisasi pelaksanaan penyediaan rumah layak huni

di wilayah hinterland adalah 2.501 Unit atau 74,00% sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara bertahap untuk tahun 2023 realisasi atas capaian diukur hanya dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh satker kementerian yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk APBD Kota Batam sendiri tidak terdapat alokasi anggaran untuk penanganan RTLH menjadi RLH dikarenakan adanya prioritas lain yang lebih mendesak.

Secara umum data lingkungan perumahan/permukiman yang ada di Kota Batam wilayah hinterland sejumlah 79 Lingkungan Perumahan/Permukiman yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan. Basis data tersebut diperoleh berdasarkan kondisi data perumahan yang terdapat di Kota Batam untuk wilayah hinterland dengan kondisi perumahan yang diselenggarakan oleh pengembang tidak termasuk Kavling Siap Bangun (KSB) ataupun Kampung Tua. Realisasi untuk pelaksanaan sampai dengan tahun 2023 tercapai dengan persentase 77,78% (61 Lingkungan Perumahan/Permukiman) dengan tingkat capaian 102,41% dari target yang ditetapkan yakni 75,95% (60 Lingkungan Perumahan/Permukiman) melebihi dengan target yang ditetapkan. Dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2023 untuk wilayah hinterland realisasi melebihi target dikarenakan, wilayah hinterland menjadi skala prioritas penanganan infrastruktur, sedangkan penetapan target berdasarkan perhitungan rata-rata penanganan yang selalu dikerjakan pada periode sebelumnya.

Luasan kawasan permukiman kumuh di wilayah hinterland berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019 adalah 882,43 Ha yang dijadikan basis data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,78 Hektar, 2021 sebesar 74,55 Ha, 2022 sebesar 56,83 Ha dan Tahun 2023 sebesar 281,28 Ha. Dalam proses penganggaran untuk wilayah hinterland yang menjadi prioritas tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan berdasarkan program yang ada yakni Program Kawasan Permukiman tidak ada alokasi target kinerja anggaran yang ditetapkan, realisasi yang ada bersumber dari pelaksanaan

anggaran pembangunan beberapa aspek kumuh lain seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah serta persampahan dan RTH yang dilaksanakan oleh baik Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melalui program lainnya maupun Perangkat Daerah lain yang melaksanakan program yang menunjang penanganan aspek kumuh serta dialokasikannya 4 kelurahan yang merupakan Kawasan Investasi dari Lokasi Kumuh sehingga realisasi terhitung tetap ada dengan capaian 100% atau 46,85%.

Kebutuhan infrastruktur kota Batam untuk wilayah hinterland masih terdapat infrastruktur yang perlu dibangun dengan total 108.058,95 Meter, dengan realisasi pembangunan tahun 2023 sepanjang 30.306,75 Meter. Hasil capaian pengurangan terhadap realisasi tersebut masih menyisakan kebutuhan sepanjang 77.752,20 Meter yang harus ditangani sampai dengan berakhirnya renstra perangkat daerah.

Capaian tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk wilayah perkotaan sebesar 89,87% (30.306,75 Meter) terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang dilaksanakan melalui APBD Kota Batam serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kota Batam melalui APBD Provinsi. Apabila dibandingkan, realisasi capaian tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang terealisasi 27.987,36 Meter, hal ini dikarenakan tahun 2023 Kota Batam prioritas pembangunan dan penganggaran fokus pada penanganan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu dipengaruhi oleh kondisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang cukup sehingga mampu menopang pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam pencapaian kinerja ini dipengaruhi juga dengan beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman di wilayah hinterland.
2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah hinterland.
3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang mana sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan.
4. Ketersediaan jenis transportasi laut belum memadai dan terlayani dalam pendistribusian barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya.

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland, sebagai berikut:

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pengembangan infrastruktur permukiman dengan terbitnya Permen PUPR No. 6 tahun 2021
2. Masih tersedianya lahan yang luas dalam pengembangan permukiman di kawasan hinterland

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses wilayah hinterland terhadap material pembangunan fisik
2. Perbaiki database untuk Calon Penerima Rumah Tidak Layak Huni
3. Adanya pelaksanaan pembaharuan database calon penerima RTLH.
4. Pemerintah Kota perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman.

5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun Pemerintah Kota.
6. Pemerintah Kota harus memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan.
7. Menambah armada laut sebagai simpul konektivitas antar pulau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Hinterland.

## **2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah *hinterland***

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di wilayah *Hinterland* adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah *Hinterland* (di luar wilayah *mainland* P. Batam)

Capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 97% dari target sebesar 91% yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,59%. Capaian ini melebihi target sebagai tahun kedua RPJMD dengan target akhir 2026 sebesar 100% maka capaian kinerjanya mencapai 97%.

Ketercapaian indikator Sasaran untuk tahun 2023 didukung dengan adanya hibah sarana transportasi laut dari Kementerian Sosial pada bulan November 2023 berupa 3 unit kapal penumpang berkapasitas 20 orang dengan maksimal daya angkut 40 orang per kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut anak sekolah di wilayah hinterland, dengan rute sebagai berikut:

Rute 1 : Pulau Gara - Pulau Lingka - Pulau Bertam  
Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara  
Pulau Gara – Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Rute 2 : Pulau Mecan - Pulau Sarang - Pulau Lengkang - Pulau Sambu  
- Belakang Padang

Belakang Padang – Pulau Sarang – Pulau Mecan – Pulau  
Sarang – Pulau Mecan

Pulau Mecan – Belakang Padang – Pulau Sambu – Pulau  
Lengkang – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Rute 3 : Pulau Terong – Pulau Tambar – Pulau Geranting

Pulau Geranting - Pulau Tambar – Pulau Geranting

Pulau Geranting – Pulau Tambar – Pulau Terong

Gambar

Kapal Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023  
untuk angkutan anak sekolah



**Sumber:** Dishub Kota Batam

Pemenuhan indikator ini didukung dengan pencapaian tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut dengan tingkat capaian kinerja dengan capaian 87% dengan realisasi 43% dari target 49%. Ketercapaian pada indikator Program ini dinilai tinggi dengan membandingkan jumlah masyarakat hinterland yang dilayani dengan angkutan laut dibagi jumlah daya angkut angkutan laut dalam satu tahun, namun dalam pencapaian target dinilai masih belum memenuhi pencapaian yang diharapkan hal ini dikarenakan jumlah masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut masih belum maksimal, hal ini bisa juga

dikarenakan kapal milik Dinas Perhubungan Kota Batam masih melayani dua kecamatan hinterland dari 3(tiga) wilayah hinterland yang ada di Kota Batam yaitu Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang dengan total jumlah pulau yang dilalui masih 20 pulau dari 30 pulau yang direncanakan akan beroperasi.

Tingkat aksesibilitas ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Transportasi yang melaksanakan angkutan laut untuk masyarakat di wilayah hinterland. Transportasi laut yang tersedia sebanyak 1 Unit Kapal (KM Sri Lenggang) dan 3 Unit Speed Boat (Sri Jaloh, Sri Mecan dan Sri Nipah), yang beroperasi seminggu selama 3 (tiga) hari yaitu pada Senin, Rabu dan Sabtu dengan rute sebagai berikut:

1. Rute KM Sri Lenggang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat nenek - Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air Lingke
4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang

Gambar  
pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan  
di wilayah hinterland Tahun 2023



**Sumber:** Dishub Kota Batam

### **3. Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah *hinterland***

Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland adalah cakupan penduduk yang memperoleh layanan air bersih dan sanitasi yang layak dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam).

Di Kota Batam pada saat ini terdapat 2 tempat pelayanan air bersih, yaitu mainland dan hinterland. Jenis penyediaan air bersih mainland pada dasarnya merupakan air minum yang telah disediakan oleh Perusahaan Penyediaan Air Bersih di Kota Batam untuk melayani kebutuhan aktivitas di Kota Batam yang saat ini masih dalam pengelolaan BP Batam. Sedangkan penyediaan air bersih di hinterland tidak bersumber pada Perusahaan Penyediaan Air Bersih melainkan dari sumber air baku yang dapat diambil dari sumur gali/bor, mata air dan lain-lain.

Pada tahun 2023 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki target untuk indikator cakupan layanan air bersih sebesar 31,38 dan terealisasi sebesar 36,58 dengan capaian 116,57%. Capaian layanan pada tahun 2022 tercapai sebesar 122,23% dari target 29,55%, berdasarkan hal tersebut terjadi penurunan layanan sebesar 5,66%. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 37,80%, capaian kinerja tahun ini sudah mencapai 96,77%.

Pengukuran dilaksanakan atas Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis, Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Operasional/Pemeliharaan SPAM di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2023 berjumlah 7.662 SR atau sekitar 30.648 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2021 s.d 2026 pada tahun 2023 Pemerintah Kota Batam menambah pengelolaan penyediaan air bersih di hinterland sebanyak 319 SR atau sebanyak 1.276 jiwa dengan lokasi sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Pulau Nguan Kel. Galang Baru Kec. Galang sebanyak 51 SR/ 204 Jiwa
2. Pembangunan SPAM Pulau Seraya Kel. Batu Legong Kec. Bulang sebanyak 120 SR/480 Jiwa
3. Optimalisasi WTP Air Raja sebanyak 10 SR/40 Jiwa
4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Nguan Kel. Galang Baru Kec. Galang sebanyak 138 SR/552 Jiwa

Sedangkan pengelolaan penyediaan air bersih di hinterland dengan jumlah yang terlayani sampai akhir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel**

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d. akhir Tahun 2023

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Kec/Kel	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	NAMA WADUK	Ket
1	WTP Belakang Padang	Belakang Padang	1.328	5.312	Waduk Sekanak 1 Dan Sekanak 2	Waduk dan Tadah Hujan
2	WTP Mecan	Pulau Mecan	264	1.056	WADUK MECAN	Waduk dan Tadah Hujan
3	WTP Pemping	Pulau Pemping	213	852	WADUK PEMPING	Waduk dan Tadah Hujan
4	WTP Kasu	Kasu	208	836	Waduk Sungai Lumba	Waduk dan Tadah Hujan
5	WTP Ngenang	Ngenang	172	688	Waduk Ngenang	Waduk dan Tadah Hujan
6	WTP Pecung	Pecung	243	972	Waduk Tanjung Kerang	Waduk dan Tadah Hujan

7	WTP Bulang	Bulang Lintang	239	956	Waduk Bulang Lintang	Waduk dan Tadah Hujan
8	WTP Geranting	Pulau Terong	193	772	Waduk Pulau Riang	Waduk dan Tadah Hujan
9	WTP Terong	Pulau Terong	277	1.108	Waduk Air Batang	Waduk dan Tadah Hujan
10	WTP Setokok	Pulau Setokok	114	456	Waduk Setokok	Waduk dan Tadah Hujan
11	WTP Air Raja	Air Raja	156	624	Waduk Air Raja	Waduk dan Tadah Hujan
12	WTP Subang Mas	Subang Mas	67	268	Waduk Subang Mas	Waduk dan Tadah Hujan
13	WTP Rempang Cate	Rempang Cate	137	548	Waduk Rempang Cate	Waduk dan Tadah Hujan
14	WTP Sembulang	Sembulang	77	308	Tangkapan Air Sembulang	Tangkapan Air
15	WTP Pulau Abang	Pulau Abang	334	1.336	Waduk Pulau Abang	
16	IKK Tiangwangkang	Tembesi	444	1.776		PT. Moya/Spam Batam
17	IKK Pulau Buluh	Pulau Buluh	549	2.196		PT. Moya/Spam Batam
18	SWRO Belakang Padang	Sekanak Raya	848	3.392		Air Laut
19	WTP Jaloh	Pantai Gelam	226	904	Waduk Pulau Jaloh	Waduk dan Tadah Hujan

20	WTP Temoyong	Temoyong	159	636	Waduk Temoyong	Waduk dan Tadah Hujan
21	WTP Air Gara Bertam	Kasu	160	640	Waduk Bertam	Waduk dan Tadah Hujan
22	WTP Tanjung Banun	Sembulang	97	388	Waduk Tanjung Banun	Waduk dan Tadah Hujan
23	WTP Petong	Pulau Abang	115	460		Waduk dan Tadah Hujan
24	WTP Kp. Baru Galang	Subang Mas	81	324		Waduk dan Tadah Hujan
25	WTP Galang Baru	Galang Baru	299	1,196		Waduk dan Tadah Hujan
26	WTP Pulau Air	Batu Legong	120	480		Waduk dan Tadah Hujan
27	SWRO Pulau Labu	Batu Legong	50	200		Air Laut
28	WTP Selat Nenek	Temoyong	225	900		Waduk dan Tadah Hujan
29	WTP Nguan	Galang Baru	188	752		
30	WTP Seraya	Batu Legong	120	480		Waduk dan Tadah Hujan
<b>Jumlah</b>			<b>7.662</b>	<b>30.648</b>		

**Sumber:** Dinas CKTR Kota Batam

Untuk pengelolaan penyediaan sanitasi di hinterland dengan jumlah yang terlayani dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 1.979 KK atau 9.895 jiwa. Untuk rekapitulasi jumlah penambahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.48**  
Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d. Akhir Tahun 2023

No	Jenis Layanan/Lokasi	Kec/Kel	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Pelaksana
1	Tangki Septik Skala Komunal Pulau Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	10	50	CV. Cipta Karya Anda
2	Tangki Septik Skala Komunal Pulau Abang	Pulau Abang/Galang	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah
3	Tangki Septik Skala Komunal Pulau Air	Batu Legong/Bulang	10	50	CV. Cipta Karya Anda
4	Tangki Septik Skala Komunal Pulau Air Lingka	Galang Baru/Galang	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah
5	Tangki Septik Skala Komunal Selat Nenek	Temoyong/Bulang	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah
6	Tangki Septik Skala Komunal Pulau Bertam	Kasu/Belakang Padang	10	50	CV. Cipta Karya Anda
7	Tangki Septik Skala Komunal Pulau labu	Batu Legong/Bulang	10	50	CV. Cipta Karya Anda
8	Tangki Septik Skala Komunal Pulau Temoyong	Temoyong/Bulang	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah
<b>Jumlah</b>			<b>80</b>	<b>400</b>	

*Sumber: Dinas CKTR Kota Batam*

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah:

1. Adanya komitmen dari semua Stage Holder untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah Hinterland dan kawasan yang menjadi tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
2. Rancangan peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah Hinterland yang memiliki sumber air baku dan atau yang memiliki konektivitas jaringan pipa ATB terdekat.
3. Keterlibatan masyarakat berupa hibah lahan ikut punya andil yang besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secepatnya dapat tercapai.
4. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat
5. Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada meteran didepan rumah.
6. Komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK untuk penyediaan sarana air bersih.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga sulit membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.
2. Sulitnya dan terbatasnya sumber air baku yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan pengolahan air bersih sampai mengalir ke rumah-rumah, bahkan ada sebagian lokasi WTP hanya mengandalkan sumber air hujan.
3. Lokasi yang akan dijadikan pengolahan air bersih merupakan pulau-pulau kecil hanya berpenduduk tidak kurang dari 100 jiwa, sehingga menimbulkan cost yang tidak sedikit.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80.653.332.336,-	53.004.889.473,-	65,72

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Pelayaran	4.949.243.522	3.842.077.826,-	77,63

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	34.791.947.430,-	33.981.208.246,-	97,67
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.131.200.000,-	2.018.777.000,-	94,72
Total		36.923.147.430,-	35.999.985.246,-	97,50

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

## 6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi

### Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	64,00	56,98	89,03%	81,01 (A -)	70,34
2023	70,01	81,92	117,03		101,14

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Realisasi kinerja nyata indikator “Indeks Reformasi Birokrasi” adalah sebesar 81,92 dari target sebesar 70,01 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 117,03%, capaian ini telah melebihi target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 81,00 maka capaian kinerja sasaran indikatornya sudah mencapai 101,14%.

Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada implementasi RB General dan RB Tematik, Namun, masih ada yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi, antara lain:

1. Penerapan reformasi birokrasi yang optimal hingga tingkat Perangkat Daerah.
2. Rencana aksi oleh agen perubahan yang berkelanjutan dan mampu menggerakkan perubahan.
3. Meningkatkan pemahaman RB sebagai bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bukan lagi sebagai tugas tambahan.

4. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan
5. Pengelolaan SDM yang belum optimal.
6. Pengawasan atas kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
7. Kebijakan sistem kompensasi penerima layanan.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Adapun rekomendasi yang diberikan atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, yaitu:

1. Menyusun Rencana aksi berupa "*how to*" atau langkah-langkah untuk mencapai kegiatan utama;
2. Peningkatan kualitas perencanaan, melalui perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh PD, penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART, reviu terhadap proses dan kualitas penyusunan perencanaan untuk memastikan apakah program dan kegiatan telah mendukung ketercapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah;
3. Peningkatan implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan melalui penetapan selera risiko sebagai dasar dalam menentukan perlakuan risiko pada penyusunan register risiko, mengidentifikasi dan menyusun risiko strategis baik pada seluruh perangkat daerah dan mengoptimalkan fungsi struktur manajemen risiko, dan mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah.
4. Memperluas pemanfaatan data statistik yang dihasilkan dengan melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna.

Dalam upaya mewujudkan RPJMD 2021-2026, Indeks Reformasi Birokrasi didukung dengan 5 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini. Rincian capaian kinerja per indikator tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Capaian Kinerja Indikator Sasaran Mewujudkan Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan**  
**Dan Mengayomi Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target RPJMD (2026)	Capaian Realisasi 2023 Thd Target RPJMD (2026)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Nilai Tata Kelola Kearsipan PD	55 (cukup)	37,78	68,69	60	57,42	95,70	70 (baik)	82,03
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100	Level 3	100
3	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	36,47% dan 44,44%	29,77 dan (0,91)	81,63 dan -2,05	9,44	66,89	705,58	4,72 dan 4,72	-
4	Indeks Profesionalitas ASN	55,49	66,71	120,22	60,89	85,91	143,18	66	130,17
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,31	88,50	100,22	89	89,01	100,01	92	95,75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		78,12			229,50			-	-

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

### 1. Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD

Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD merupakan hasil penilaian atas pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dikeluarkan oleh Lembaga ANRI melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Realisasi kinerja nyata indikator “Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD” adalah sebesar 57,42 dari target sebesar 60,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95,72%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 70, maka capaian kinerja sasaran indikatornya mencapai 82,03%.

Dengan besaran pencapaian tersebut, dipengaruhi beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Implementasi pengarsipan melalui aplikasi Srikandi
2. Adanya pembinaan kepada perangkat daerah selaku pembuat arsip

Sedangkan faktor yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD, sebagai berikut:

1. Lemah jaringan internet di beberapa lokasi Perangkat Daerah sehingga menghambat penggunaan aplikasi srikandi
2. Keterbatasan perangkat daerah dalam membuat arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
3. Dukungan SDM Kearsipan perangkat daerah belum memadai.

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah sinyal penguat untuk meningkatkan jaringan internet di beberapa lokasi Perangkat Daerah yang jauh dari jangkauan.
2. Adanya sosialisasi terhadap pemanfaatan srikandi di setiap masing-masing perangkat daerah
3. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip terhadap SDM pengelola arsip masing-masing perangkat daerah
4. Adanya regulasi turunan dari Pemerintah Daerah terkait kearsipan
5. Pemanfaatan Aplikasi oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam

## Gambar

### Pencanangan Gerakan Batam Sadar Tertib Arsip (GERBANG SATRIA)



*Sumber: Dispusip Kota Batam*

## 2. Tingkat Maturitas SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengawasan yang professional dilingkungan Pemerintah Kota Batam atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah Kota Batam berperan untuk menciptakan manajemen pemerintahan yang baik, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Terintegrasi pada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Batam telah melakukan sosialisasi tersebut untuk semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. SPIP terintegrasi tersebut dimaksudkan sebagai manajemen yang dikoordinasikan oleh Bagian Perencanaan atau fungsi lainnya dalam melakukan Penilaian Mandiri (PM), APIP (Inspektorat) dalam melakukan Penjaminan Kualitas (PK), dan BPKP dalam melakukan Evaluasi yang mana keberhasilan implementasi SPIP terintegrasi membutuhkan komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, dengan menerapkan Manajemen Risiko yang mendukung pencapaian tujuan. Begitu juga bagi APIP, untuk dapat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko-risiko fraud (termasuk korupsi), dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). APIP juga harus dapat mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

Realisasi kinerja nyata indikator “tingkat maturitas SPIP” adalah sebesar 100% dari target level 3 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi pada level 3, capaian ini sudah sesuai target yang diperjanjikan dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kategori penilaian tingkat Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar pada level 3, maka capaian kinerja sasaran indikatornya Pemerintah Kota Batam sudah pada capaian tertinggi.

Dengan berkembangnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, perlu penilaian yang dapat menggambarkan Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP khususnya daerah. Diantaranya guna menilai tingkat kematangan, keandalan sistem dan memberi keyakinan bahwa proses penyelenggaraan SPIP sudah sesuai. Atas pencapaian SPIP Kota Batam yang selama tiga kali berturut-turut telah meraih level 3, dan dari peraihan WTP (Opini Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah mencapai

11 kali berturut-turut Kota Batam sudah layak mendapatkan level 4 dengan nilai Maturitas SPIP sebesar 3,5 hingga 3,8.

**Gambar**  
**Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Maturitas**  
**Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**  
**Terintegrasi Tahun 2023**



**Sumber:** *Inspektorat Daerah Kota Batam*

Walaupun besaran pencapaian sudah cukup tinggi, namun masih ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi, antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM sebagai auditor internal yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;
2. Formasi kebutuhan Auditor dan P2UPD belum memadai;

3. Prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang masih belum optimal dan memadai;
4. Rendahnya perhatian perangkat daerah terhadap implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Rendahnya kepedulian perangkat daerah untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas mandatory belum dapat dilakukan secara maksimal.

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagai berikut:

1. Dukungan dan perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal.
2. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasional pengawasan yang cukup
3. Optimalisasi pemberdayaan prasarana dan sarana serta sumber daya APIP yang dimiliki; dan
4. Adanya koordinasi yang baik antara APIP dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemberdayaan prasarana dan sarana serta sumber daya APIP yang dimiliki
2. Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya.
3. Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindaklanjutnya
4. Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan.

### 3. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah

Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah adalah meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja nyata indikator “Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah” diketahui bahwa pada tahun 2023 capaian kinerja Pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 18,56% dari target 4,72% atau tingkat capaian sebesar 393,22% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan sangat tinggi dan untuk Pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 48,40% dari target 4,72% atau tingkat capaian sebesar 1.025,42% sehingga kinerja pelayanan dikategorikan sangat tinggi dan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 adalah 9,44% dengan realisasi sebesar 66,89 untuk pertumbuhan pajak dan retribusi daerah sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 708,58%, capaian ini sudah melebihi target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 4,72, maka capaian kinerja sasaran indikatornya sudah melebihi target. Perbandingan secara rinci dapat dilihat berikut ini:

Tabel  
Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah  
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Retribusi Daerah	Pendapatan Tahun 2022	Pendapatan Tahun 2023	Bertambah / Berkurang	%
1.	Jasa Umum	61.179.806.749,00	57.348.641.570,00	(3.831.165.179,00)	-6,26
2.	Jasa Usaha	920.756.583,00	774.831.181,00	(145.925.402,00)	-15,85
3.	Perizinan Tertentu	32.558.977.400,32	82.354.283.426,00	49.795.306.025,68	152,94
Total		94.659.540.732,32	140.477.756.177,00	45.818.215.444,68	48,40

**Sumber:** Bapenda Kota Batam

Realisasi kinerja dari sektor pajak daerah tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022, terjadi penurunan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), namun pada total pendapatan mengalami kenaikan sebesar 18,56%. Perbandingan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah  
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Tahun 2022	Pendapatan Tahun 2023	Bertambah / Berkurang	%
1.	Hotel	84.740.006.009,87	126.886.150.892,90	42.146.144.883,03	49,74
2.	Restoran	95.073.526.838,43	128.562.815.490,00	33.489.288.651,57	35,22
3.	Hiburan	24.259.965.806,34	33.769.076.763,65	9.509.110.957,31	39,20
4.	Reklame	8.119.832.000,00	19.813.768.911,00	11.693.936.911,00	144,02
5.	Penerangan Jalan	250.768.369.457,95	275.282.708.069,00	24.514.338.611,02	9,78
6.	Mineral bukan Logam dan Batuan	3.129.240.695,01	1.922.189.450,35	(1.207.051.244,66)	-38,57
7.	Parkir	8.997.995.028,00	10.874.997.754,00	1.877.002.726,00	20,86
8.	BPHTB	346.139.511.039,00	414.286.200.730,00	68.146.689.691,00	19,69
9.	PBB P2	212.752.444.071,00	214.532.037.383,00	1.779.593.177,00	0,84
Total		796.651.133.373,17	1.225.929.945.443,90	191.949.054.363,27	18,56

**Sumber:** Bapenda Kota Batam

Dengan besaran pencapaian tersebut, dipengaruhi beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya
2. Kerjasama dalam meningkatkan pajak belum dilakukan dengan pihak swasta
3. Dukungan SDM dalam melakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan standar yang diperlukan

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Program Relaksasi Pajak Daerah, Relaksasi BPHTB yaitu pemberian discount 50% terhadap pemindahan karena hibah yang dibuktikan dengan akta hibah, dan pemberian discount 10% terhadap pemberian hak baru untuk luasan tanah minimal 10.000 M<sup>2</sup>; Database terhadap wajib pajak daerah.
2. Penghapusan denda PBB-P2 yaitu piutang tahun 1994 s.d 2022.
3. Peningkatan Layanan Perpajakan Secara Online melalui aplikasi Whatsapp serta melakukan Validasi Online melalui e-signature, berkas validasi dapat dicek langsung oleh PPAT.
4. Implementasi alat rekam pajak (CSR Bank Riau Kepri Syariah 525 unit, dan APBD 2023 sebanyak 200 unit.
5. Melakukan Roadshow (Jemput Bola) Pelayanan PBB di 12 (dua belas) Kecamatan, Komplek Perumahan dan Pusat Perbelanjaan.
6. Mobilisasi Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (SIBIJAK), layanan pajak keliling ke pemukiman warga dan goes to school.
7. Pengembangan Sistem Manajemen Reklame (SIMREK).
8. Penagihan secara aktif terhadap Piutang Pajak Daerah.
9. Pemasangan spanduk peringatan/teguran kepada wajib pajak tidak taat.
10. Pengembangan mitra layanan pembayaran Pajak Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah bank seperti Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB, Bank Mandiri.

11. Pengembangan mitra layanan pembayaran Pajak Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah kanal digital seperti Gotagihan, LinkAja, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, Pospay, BliBli.com, Alfamart, Indomaret, Qris.
12. Peningkatan pelayanan dengan kerjasama lintas instansi seperti PT. Bright PLN Batam, DJPK Kanwil Provinsi Kepri, BPN Kota Batam, Disdukcapil, Diskominfo, DPMPSTP, Kejaksaan Negeri Batam, BP Batam, KPKNL Batam, OPD Penghasil.
13. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar tercipta kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) bekerjasama dengan instansi terkait.

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan regulasi terbaru atas hasil evaluasi tarif retribusi yang sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini.
2. Melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah. Hal ini dilakukan agar tumbuhnya kesadaran dalam melakukan pembayaran retribusi daerah.
3. Membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini OPD Penghasil tentang tugas dan tanggung jawab selaku pengelola retribusi daerah sesuai bidang tugasnya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

**Gambar**  
**Realisasi PAD Kota Batam**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4-3	(6) = 5/3*100
1	Hasil Pajak Daerah	1.033.980.891.080,63	1.225.929.945.443,90	191.949.054.363,27	18,56
2	Hasil Retribusi daerah	94.659.540.732,32	140.477.756.177,00	45.818.215.444,68	48,40
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	10.376.332.794,00	10.205.472.833,00	(170.859.961,00)	-1,65
4	Lain-lain PAD yang Sah	143.168.627.464,30	152.464.616.655,89	9.295.989.191,59	6,49
<b>JUMLAH</b>		<b>1.282.185.392.071,25</b>	<b>1.529.077.791.109,79</b>	<b>246.892.399.038,54</b>	<b>19,26</b>

**Sumber: Bapenda Kota Batam**

#### **4. Indeks Profesionalitas ASN**

Sesuai amanat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Realisasi kinerja nyata indikator “Indeks Profesionalitas ASN” adalah sebesar 85,91 dari target sebesar 60,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 143,18%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 22,96% dari 120,22%, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 66,00, maka capaian kinerja sasaran indikatornya sudah mencapai 130,17%.

Dengan besaran pencapaian tersebut, dipengaruhi beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Implementasi sistem kerja pasca penyelenggaran penyetaraan jabatan fungsional yang masih perlu didalami agar memberikan gambaran jelas mekanisme dari Kementerian/KL Pembina.
2. Tidak mengunggah sertifikat ketrampilan atau keahlian dalam mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.
3. Masih kurangnya tenaga fungsional di kawasan hinterland seperti tenaga guru, tenaga medis, serta jangkauan pelayanan yang berjauhan dikarenakan pemukiman yang terpencar-pencar antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN, sebagai berikut:

1. Kebutuhan ASN terpenuhi setiap tahunnya sesuai dengan standar dan kualifikasi yang dibutuhkan
2. Peningkatan kesejahteraan ASN Kota Batam menjadi perhatian pimpinan

3. Akses terhadap peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN tersedia baik melalui dana Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat maupun Swasta
4. Dukungan kebijakan dan regulasi Pemerintah Kota Batam dalam berbagai aspek untuk meningkatkan profesionalitas ASN.

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, antara lain:

1. Adanya penilai untuk masing-masing jabatan fungsional di Pemerintah Kota Batam
2. Sosialisasi terhadap perangkat daerah terkait perubahan-perubahan regulasi kepegawaian
3. *Punishment* dan *Reward* yang jelas terhadap individu ASN sehingga dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan struktural.
5. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

Gambar

Rapat Koordinasi Data Dan Informasi Kepegawaian



**Sumber:** BKPSDM Kota Batam

## **5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Batam telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat. Survey kepuasan pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, Sarana dan Prasarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai akhir dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61 – 88,30.

Untuk pengukuran sesuai RPJMD atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pemerintah Kota Batam melakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau per semester, pada tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah sudah mendapatkan nilai IKM diatas 83 atau tepatnya diatas target yang diperjanjikan 89,00 dengan realisasi 89,01 sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 100,01%. Untuk hasil survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2023 dapat dilihat pada rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat sebagaimana tabel berikut:

Tabel  
 Rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat  
 pada perangkat daerah semester I dan semester II tahun 2023  
 di lingkungan Pemerintah Kota Batam  
 (Berdasarkan PermenPANRB RI No. 14 Tahun 2017)

No	Perangkat Daerah	SKM SEMESTER I			SKM SEMESTER II		
		IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Inspektorat Daerah	83,47	B	Baik	87,44	B	Baik
2	Sekretariat DPRD	89,89	A	Sangat Baik	88,15	A	Sangat Baik
3	Satuan Polisi Pamong Praja	92,20	A	Sangat Baik	92,60	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	92,33	A	Sangat Baik	92,54	A	Sangat Baik
5	Dinas Kesehatan	89,04	A	Sangat Baik	92,58	A	Sangat Baik
6	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	86,79	B	Baik	89,52	A	Sangat Baik
7	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	83,99	B	Baik	87,95	B	Baik
8	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	90,67	A	Sangat Baik	90,67	A	Sangat Baik
9	Dinas Tenaga Kerja	82,99	B	Baik	84,45	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	84,88	B	Baik	85,01	B	Baik

11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	81,99	B	Baik	84,93	B	Baik
12	Dinas Perikanan	95,99	A	Sangat Baik	96,00	A	Sangat Baik
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	87,32	B	Baik	88,02	B	Baik
14	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	91,40	A	Sangat Baik	92,73	A	Sangat Baik
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	88,49	A	Sangat Baik	88,64	A	Sangat Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	86,71	B	Baik	88,00	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	82,99	B	Baik	86,69	B	Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,04	A	Sangat Baik	89,77	A	Sangat Baik
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	90,67	A	Sangat Baik	90,84	A	Sangat Baik
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	90,70	A	Sangat Baik	90,33	A	Sangat Baik
21	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan	89,88	A	Sangat Baik	90,04	A	Sangat Baik
22	Dinas Pertanahan	90,66	A	Sangat Baik	93,91	A	Sangat Baik
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	82,64	B	Baik	96,46	A	Sangat Baik
24	Dinas Kepemudaaan Dan Olahraga	81,99	B	Baik	87,76	B	Baik

25	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	100	A	Sangat Baik	90,42	A	Sangat Baik
26	Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	91,24	A	Sangat Baik	91,46	A	Sangat Baik
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.63	A	Sangat Baik	89,19	A	Sangat Baik
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	92,58	A	Sangat Baik	95,48	A	Sangat Baik
29	Badan Pendapatan Daerah	87,59	B	Baik	89,54	A	Sangat Baik
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	98.51	A	Sangat Baik	98,51	A	Sangat Baik
31	Kec. Batu Ampar	84,30	B	Baik	93,40	A	Sangat Baik
32	Kec. Lubuk Baja	83.48	B	Baik	84,79	B	Baik
33	Kec. Bengkong	84,87	B	Baik	87,56	B	Baik
34	Kec. Batam Kota	87,26	B	Baik	91,22	A	Sangat Baik
35	Kec. Nongsa	86,61	B	Baik	87,04	B	Baik
36	Kec. Batu Aji	89,79	A	Sangat Baik	90,67	A	Sangat Baik
37	Kec. Sagulung	87,02	B	Baik	92,40	A	Sangat Baik
38	Kec. Galang	87,13	B	Baik	88,04	B	Baik
39	Kec. Bulang	87,66	B	Baik	88,29	B	Baik
40	Kec. Sekupang	83,75	B	Baik	85,56	B	Baik
41	Kec. Sungai Beduk	100	A	Sangat Baik	98,95	A	Sangat Baik
42	Kec. Belakang Padang	87.70	B	Baik	85,96	B	Baik

**Sumber:** Bagian Organisasi Setdako Batam

Dari data tersebut di atas menunjukkan gambaran hasil penilaian IKM pada 42 PD/Unit Kerja di Lingkungan pemerintah Kota Batam Tahun 2023. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II sesuai rencana dilakukan pada akhir tahun berjalan yaitu pada bulan Desember, sehingga pada akhir tahun 2023 diperoleh 2 (dua) data IKM yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan pengukuran fluktuasi data yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik.

Adapun hasil survey kepuasan masyarakat pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Batam, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel**  
Data IKM Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam  
Tahun 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI IKM SEMESTER 1	KINERJA UNIT PELAYANAN	NILAI IKM SEMESTER 2	KINERJA UNIT PELAYANAN	KET
1	PKM BELAKANG PADANG	80,50	Baik	88,35	Sangat Baik	Naik
2	PKM SUNGAI PANAS	85.20	Baik	85,67	Baik	Naik
3	PKM BATU AJI	88,35	Sangat Baik	88,82	Sangat Baik	Naik
4	PKM KABIL	88,82	Sangat Baik	88,83	Sangat Baik	Naik
5	PKM GALANG	87,70	Baik	84,60	Baik	Turun
6	PKM SEKUPANG	76,85	Baik	93,24	Sangat Baik	Naik
7	PKM BALOI PERMAI	87,56	Baik	88.66	Sangat Baik	Naik
8	PKM SEI. PANCUR	84,00	Baik	84,80	Sangat Baik	Naik
9	PKM TG. SENGKUANG	81.71	Baik	82,15	Baik	Naik

10	PKM SAMBAU	85,56	Baik	89,98	Sangat Baik	Naik
11	PKM LUBUK BAJA	90,55	Sangat Baik	90,56	Sangat Baik	Naik
12	PKM SEI.LEKOP	83,25	Baik	83,41	Baik	Naik
13	PKM BULANG	86,53	Baik	87,63	Baik	Naik
14	PKM BOTANIA	100	Sangat Baik	89,54	Sangat Baik	Turun
15	PKM SEI.LANGKAI	80,77	Baik	83,39	Baik	Naik
16	PKM TIBAN BARU	84,01	Baik	88,28	Baik	Naik
17	PKM TG. BUNTUNG	92,22	Sangat Baik	92,88	Sangat Baik	Naik
18	PKM KAMPUNG JABI	81,30	Baik	86,97	Baik	Naik
19	PKM REMPANG CATE	83,15	Baik	84,01	Baik	Naik
20	PKM TG. UNCANG	83,24	Baik	83,61	Baik	Naik
21	PKM MENTARAU	82,22	Baik	84,55	Baik	Naik

**Sumber:** Bagian Organisasi Setdako Batam

Dari Tabel di atas, pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa dari 21 Puskesmas yang dilakukan pengukuran IKMnya terdapat 10 Puskesmas dengan kriteria sangat baik, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 4 puskesmas, yaitu UPT PKM Belakang Padang, UPT PKM Batu Aji, UPT PKM Kabil, UPT dan UPT PKM Sekupang, sedangkan 11 Puskesmas lainnya masuk dalam Kriteria baik. Pada tahun 2023, ada 2 Puskesmas mengalami penurunan IKMnya yaitu UPT PKM Galang dan UPT PKM Botania, sedangkan 19 UPT PKM mengalami kenaikan nilai IKM. Bila diukur berdasarkan standar IKM Baik minimal nilai 83 maka seluruh Puskesmas di Pemerintah Kota Batam sudah Baik.

Berdasarkan data di atas juga dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 semester 1 dan semester 2 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:

Nilai SKM Pemerintah Kota Batam semester 1 Tahun 2023



Nilai SKM Pemerintah Kota Batam semester 2 Tahun 2023



**Sumber:** Bagian Organisasi Setda Kota Batam

Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator Sasaran Tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang hasil akhirnya ke Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan
3. Penetapan standar pelayanan belum sepenuhnya diimplementasikan pada Unit Kerja penyelenggara pelayanan
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada sebagian Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk bahan rencana kerja

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan memfasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan
2. Mendorong dan melakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan, sesuai dengan penetapan Standar Pelayanan
3. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyusun rencana kerja berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan unsur pelayanan mana yang harus tetap dipertahankan dan unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan.

Rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik melalui suvey kepuasan masyarakat ini, antara lain:

1. Secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
2. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi, memelihara, dan membangun sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Arsip	113.440.000,-	97.059.500,-	85,56

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	324.062.000,-	291.238.750,-	89,87

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Kepegawaian Daerah	1.530.147.000,00	547.047.930,00	35,75%
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.945.044.300,00	3.261.133.392,00	65,95%
Total		6.475.191.300,00	3.808.181.322,00	58,51%

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.001.364.500,-	3.864.211.611,-	77,26

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

## 7. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

### Indikator Kinerja: Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	9.56	162.25	1.697,18	11,61%	1.397,50
2023	9,51	44,37	466,56		382,17

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Capaian kinerja nyata indikator adalah sebesar 44,37 dari target sebesar 9,51 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 466,56%. Capaian ini sangat melebihi target yang diperjanjikan walalupun. Capaian ini bila dibandingkan dengan target Tahun 2026 maka capaian kinerjanya sudah mencapai cukup jauh, untuk itu perlu ditinjau ulang dengan melakukan penyesuaian target.

Pada tahun 2023, realisasi investasi Batam mencapai Rp. 15,6 Triliun. Realisasi didominasi oleh penanaman modal asing sebesar 82% atau setara Rp. 8,8 Triliun, penanaman modal dalam negeri di Batam mencapai Rp. 6,8 Triliun. Kota Batam telah memberikan kontribusi sebanyak 79,91 persen atas realisasi investasi total di Provinsi Kepri yang sebanyak 15,89 triliun dari

Januari hingga September 2023. Sedangkan untuk perizinan berusaha di Batam terbit pada tahun 2022 sebanyak 40.542 kemudian naik menjadi 100.933 pada tahun 2023. Hal ini juga didukung dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Batam melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 500 pelaku usaha di Kota Batam.



*Sumber: DPMPTSP Kota Batam*



*Sumber: DPMPTSP Kota Batam*

Berikut daftar sepuluh negara yang menanamkan modal terbesar di Batam sejak Triwulan I hingga Triwulan III Tahun 2023 :

1. Singapura USD 307,446 juta dengan 710 proyek,
2. Tiongkok USD 46,42 juta dengan 137 proyek,
3. Perancis USD 40,73 juta dengan 14 proyek,
4. Hongkong USD 37,7 juta dengan 75 proyek,
5. Jepang USD 20,52 juta dengan 41 proyek,
6. Malaysia USD 13,51 juta dengan 80 proyek,
7. Luxembourg USD 10,44 juta dengan 6 proyek,
8. Jerman USD 5,7 juta dengan 16 proyek,
9. Inggris USD 5,13 juta dengan 20 proyek,
10. Amerika Serikat USD 4,2 juta dengan 17 proyek.

Namun dengan pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim
2. Akses promosi penanaman modal masih terbatas

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan, perangkat regulasi baik dari pemerintah pusat maupun Kota Batam terkait penanaman modal
2. Memiliki potensi sektor unggulan perekonomian yang menjadi salah satu faktor masuknya investasi Kota Batam
3. Letak wilayah yang strategis berada di wilayah perbatasan antara negara Singapura dan Malaysia
4. Adanya Mall Pelayanan Publik sebagai akses kemudahan terhadap pelayanan perizinan yang terpadu
5. Pemanfaatan inovasi teknologi terhadap penyediaan database kebutuhan investasi di Kota Batam

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan SDM sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan
2. Peningkatan promosi penanaman modal tidak hanya di Dalam Negeri tetapi di Luar Negeri melalui berbagai kerjasama dan media
3. Menyelenggarakan pelayanan terpadu sesuai dengan standar dan SOP
4. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai media promosi penanaman Modal Kota Batam.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Batam ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199.999.000,-	141.340.324,-	70,67
2.	Promosi Penanaman Modal	290.011.000,-	237.664.887,-	81,95
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	450.516.000,-	369.781.071,-	82,08
Total		940.526.000,-	748.786.252,-	79,61

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

## 8. Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan

### Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	94.44	94.51	100.07	94,52%	99,99
2023	94,46	94,75	100,31		100,24

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

Capaian kinerja nyata indikator adalah sebesar 94,75 dari target sebesar 94,46 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,31%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dan meningkat dari capaian tahun 2022 walaupun tidak signifikan. Capaian ini bila dibandingkan dengan target Tahun 2026 maka capaian kinerjanya sudah mencapai 100,24%.

Pembangunan manusia berbasis gender merupakan program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan sasaran pencapaian Indeks pembangunan Gender yang berkorelasi dengan pencapaian misi ke-2 Walikota Batam dalam upaya Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Dan misi ini dituangkan dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yakni Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri.

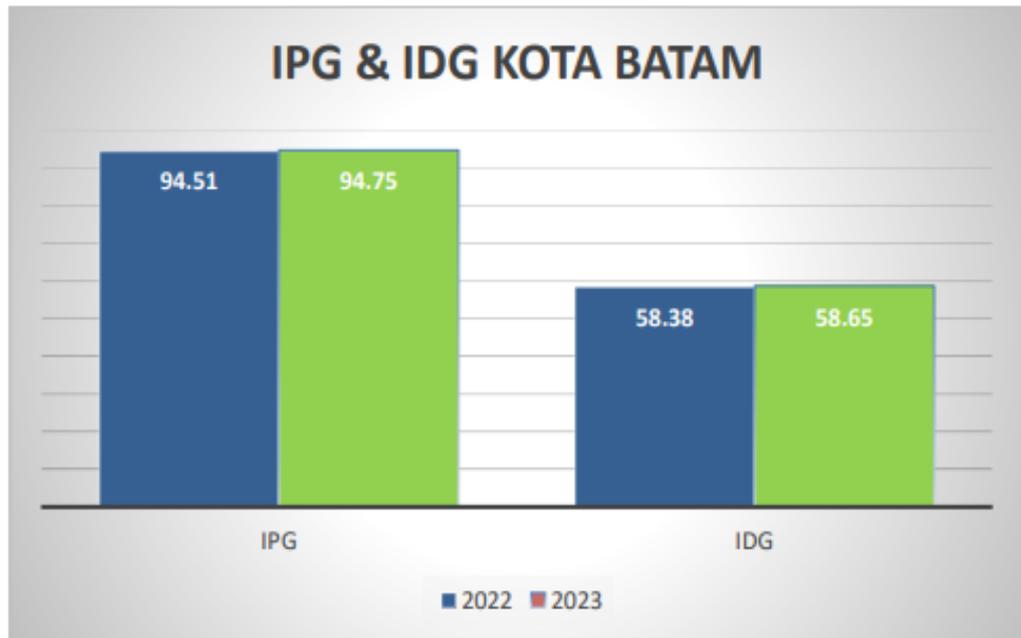
Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya

perempuan dalam mendukung terlaksananya pembangunan kota Batam dari berbagai sektor kehidupan yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan pemberdayaan gender kota Batam. Gambaran secara umum saat ini masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

Pada tahun 2023, 21.062 orang perempuan turut aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perempuan yang mencakup pelatihan kuliner/tata Boga, pelatihan Publik Speaking, Pelatihan Tata Rias dan kegiatan pembinaan yang bersinergi dengan PKK Kota Batam. Berbagai kegiatan pelatihan dilakukandalam upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan Kota Batam.

Pada tahun 2023, juga diadakan pelatihan tata rias bagi 630 orang ibu rumah tangga, pelatihan tata boga/kuliner bagi 2.077 orang, pelatihan pengembangan SDM perempuan 710 orang, pelatihan lanjutan kuliner dan pengembangan usaha bagi 730 orang, dan pelatihan *public speaking* bagi 1.065 orang perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan kaum perempuan. Menjelaskan kondisi ini sebagai berikut capaian IPG dan IDG Kota Batam Tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

Grafik  
Perbandingan Capaian Kinerja  
IPG dan IDG Tahun 2023



Data Sumber : BPS Kota Batam



Data Sumber : BPS Kota Batam

Melalui gambar grafik di atas dapat dijelaskan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94,75 yang meningkat dari kondisi tahun sebelumnya dari 94,51.

Pada tahun 2022 IPM Laki- laki sebesar 84.94 dan IPM Perempuan sebesar 80.28. Sedangkan pada tahun 2023 IPM Laki- laki 85,31 dan IPM perempuan sebesar 80.83. Ada peningkatan IPM perempuan sebesar 0.55 dari tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya akselerasi percepatan pembangunan perempuan yang mengikuti percepatan capaian pembangunan laki-laki. Jika dibandingkan dengan target Nasional secara umum pencapaian indikator IPG kota Batam sebesar 94.75 masih diatas standard dan akselerasi pembangunan gender dapat menyesuaikan dengan target yang diharapkan.

Untuk pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penghambat, antara lain:

1. Analisa terhadap perencanaan penganggaran yang responsif gender belum maksimal dilaksanakan.
2. Pemanfaatan data terpilah belum dilaksanakan di semua sektor pembangunan

Adapun beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Batam dalam hal penganggaran yang responsif gender.
2. Pemanfaatan data terpilah dalam perencanaan, dukungan anggaran terkait pembangunan gender.
3. Adanya inovasi penyediaan aplikasi data terpilah yang dapat mendukung perencanaan terhadap analisis dan identifikasi kebutuhan yang akan meminimalisir kesenjangan gender.

Solusi dan rekomendasi dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan ketersediaan data terpilah yang dapat diakses oleh publik
2. Pengembangan inovasi terhadap kebermanfaatan data terpilah
3. Keterlibatan Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam upaya perencanaan di setiap Perangkat Daerah yang reponsif gender.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.324.785.000,-	2.280.452.500,-	98,09
2.	Perlindungan Perempuan	576.364.000,-	498.713.000,-	86,53
3.	Peningkatan Kualitas Keluarga	5.942.125.440,-	5.777.685.000,-	97,23
4.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	67.242.000,-	65.873.000,-	97,96
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	649.453.000,-	634.127.450,-	97,64
6.	Pengendalian Penduduk	325.200.000,-	314.883.068,-	96,83
7.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.241.923.000,-	3.300.054.439,-	62,96
8.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.239.800.000,-	3.900.671.500,-	92,00
Total		19.366.892.440,-	16.771.224.957,-	86,60

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

## 9. Menurunnya Angka Pengangguran

### Indikator Kinerja: Tingkat Pengangguran Terbuka

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	10,00	9,56	104,40	9,55	99,90
2023	9,75	8,14	119,78		117,32

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Capaian kinerja nyata indikator pada Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 8,14 dari target sebesar 9,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 119,78%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini bila dibandingkan dengan target Tahun 2026 maka capaian kinerjanya sudah mencapai 117,32%.

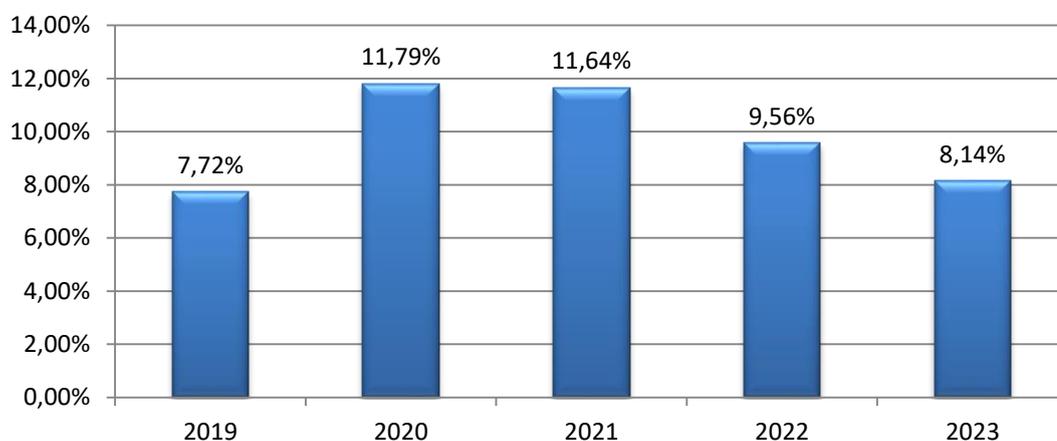
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Persentase capaian kinerja sebesar 119,78% memberi gambaran bahwa jumlah pengangguran telah menurun secara signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Angka 8,14% menunjukkan bahwa setiap 10.000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 814 orang penganggur. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batam pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel  
Perkembangan Persentase TPT di Kota Batam  
Tahun 2018 – 2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat pengangguran terbuka	7,72%	11,79%	11,64%	9,56%	8,14%

*Sumber: BPS Pusat*

Grafik  
Perkembangan Persentase TPT  
Di Kota Batam Tahun 2019 – 2023



*Sumber: BPS Pusat*

Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia pada tahun 2023, angka TPT Kota Batam paling tinggi, dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut berikut:

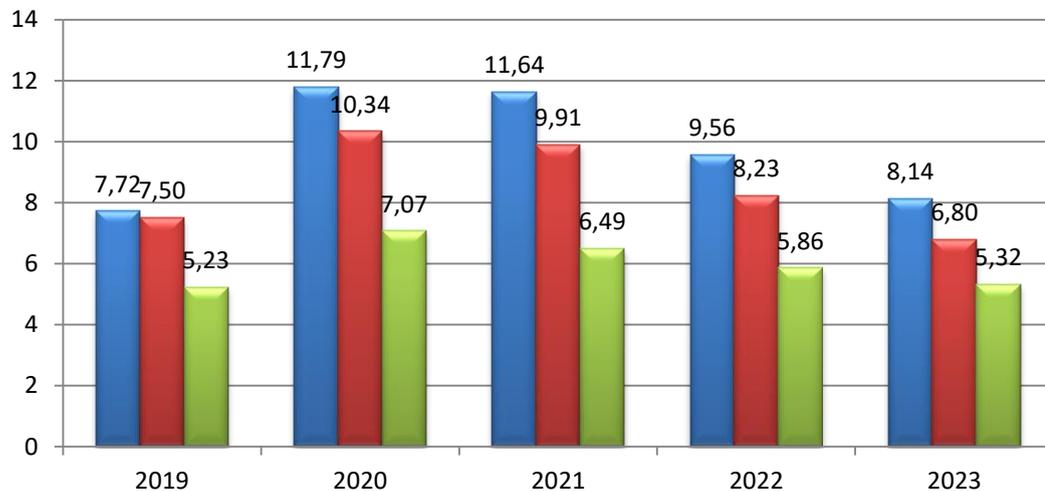
Tabel  
Perbandingan perkembangan capaian Angka TPT di Kota Batam,  
Provinsi Kepri dan Indonesia tahun 2019 - 2023

Indikator/Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Batam	7,72%	11,79%	11,64%	9,56%	8,14%
Kepulauan Riau	7,50%	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%
Indonesia	5,23%	7,07%	6,49%	5,86%	5,32%

*Sumber: BPS Pusat*

## Grafik

Perbandingan perkembangan capaian Angka TPT di Kota Batam,  
Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia tahun 2019-2023



Sumber: BPS Pusat

Adapun hambatan yang dialami dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran, yaitu:

1. Distrupsi teknologi yaitu gangguan yang mengakibatkan industri tidak berjalan sebagaimana mestinya karena bermunculan kompetitor baru yang lebih efektif dan efisien serta penemuan teknologi yang mengubah peta bisnis (Era Industri 4.0);
2. Banyaknya lulusan SMA, SMK dan Sarjana yang tidak termpung dalam lapangan pekerjaan/masih menganggur (terlalu banyak tenaga kerja yang memasuki usia produktif, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas).
3. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan oleh Lembaga Independen sebagai tolak ukur atas kinerja yang telah di laksanakan pasca pendidikan dan pelatihan.
4. Tidak adanya regulasi daerah dalam penempatan tenaga kerja sehingga meningkatnya jumlah pencari kerja yang datang dari luar daerah, karena peluang kerja yang cukup besar sebagai daya tarik migrasi pencari kerja dari luar daerah.
5. Ketersediaan SDM dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia Industri belum memadai.
6. Masih kurangnya kompetensi tenaga kerja di Kota Batam

7. Laporan lowongan kerja oleh perusahaan-perusahaan belum sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 39 Tahun 2016

Faktor pendukung dari pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya :

1. Adanya regulasi untuk percepatan penanganan masalah pengangguran: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan lain-lain;
2. Tingginya minat/antusias peserta dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam melalui beberapa Perangkat Daerah.
3. Materi yang disajikan pada saat pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan peserta.
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait lapangan pekerjaan dalam upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
5. Meningkatnya investasi sehingga memperluas akses pekerjaan.
6. Tumbuh pesat industri kecil menengah yang menyumbang lapangan pekerjaan.

Penyelesaian masalah juga diatasi dengan pelatihan kerja untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Selain itu beberapa upaya lain yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

1. Perlu ada kebijakan pemerintah dapat berupa program-program pelatihan kerja yang dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu menjadi wirausaha baru.
2. Bekerjasama dengan dunia pendidikan dalam menyediakan SDM dengan keahlian yang sesuai kebutuhan tenaga kerja di Kota Batam.
3. Memfasilitasi proses penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja baik

secara online maupun offline, serta mendorong kerjasama dalam penempatan tenaga kerja antara pemerintah, lembaga, pendidikan dan pelatihan dengan pemberi kerja (perusahaan).

4. Mendorong pelaksanaan program kegiatan padat karya yang dapat menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja secara masal.
5. Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja/Lowongan kerja melalui Job Fair/Pameran Kerja dan Sistem Bursa Kerja On-line.

Adapun perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu :

1. Dukungan sumber daya yang memadai baik dari sisi sumber daya manusia maupun data dan informasi serta anggaran.
2. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan terhadap informasi lowongan pekerjaan

#### Gambar

Berbagai Pelaksanaan Pelatihan Kepada Masyarakat oleh Disnaker Kota Batam



Sumber: Disnaker Kota Batam

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Angka Pengangguran ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	18.498.693.317,-	18.234.716.475,-	99,06
2.	Penempatan Tenaga Kerja	291.943.000,-	239.735.008,-	82,12
3.	Hubungan Industrial	258.721.000,-	248.482.000,-	96,04
Total		19.049.357.317,-	18.812.933.483,-	98,76

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

## **10. Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas**

Realisasi kinerja nyata indikator Sasaran Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas Tahun 2023 diukur dengan 2 (dua) indikator “Opini BPK” dan “Nilai LPPD” dengan capaian yang sama masing-masing sebesar 100%. Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

### Indikator Kinerja 1 : Opini BPK

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	WTP	WTP	100.00	WTP	100
2023	WTP	WTP	100.00		100

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Capaian kinerja nyata indikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” adalah Predikat WTP dari Predikat WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah Predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Batam sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target Tahun akhir RPJMD Kota Batam maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Batam, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Batam bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan laporan BPK RI, bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batam tanggal 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut. BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas maka BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan dalam laporan Nomor: **79/LHP/XVIII.TJP/04/2023** tanggal **10 April 2023** dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada penutup LHP diungkapkan bahwa perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI).

Opini WTP dari BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 belum diumumkan sampai dengan penyusunan Laporan ini, sehingga belum dapat dibandingkan capaian kinerjanya terhadap target tahun 2023, terhadap capaian tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2026.

Upaya yang dilakukan tahun 2023 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

1. Taat azas pelaksanaan APBD ;
2. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan;
3. Laporan keuangan telah memperoleh revidi yang memadai dari Inspektorat;

4. Laporan keuangan merupakan hasil penyusunan masing-masing PD bukan merupakan hasil Bidang Akuntansi saja;
5. Penguatan komitmen dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan perangkat daerah, para pengelola dan pelaksana kegiatan.

Dalam pencapaian kinerja ini, walaupun Opini BPK dapat tercapai sesuai target namun dipengaruhi juga beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum optimal,
2. Lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK,
3. Tingkat efisiensi yang belum maksimal

Sedangkan faktor yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Opini BPK RI, sebagai berikut:

1. Dukungan dari pihak legislatif dalam proses penyusunan penganggaran yang tepat waktu setiap waktunya
2. SDM yang mampu membuat laporan keuangan, penyediaan, aset yang sesuai dengan standar
3. Adanya sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran

Solusi serta rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi faktor penghambat pencapaian capaian kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan standar pemenuhan kriteria WTP.
2. Tetap menjaga kualitas dan capaian yang sudah sangat baik ini.

## Indikator Kinerja 2 : Nilai LPPD

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100.00	Sangat Tinggi	100
2023	Sangat Tinggi	Sedang (2,65)	80		80

*Sumber: Bapelitbangda Kota Batam*

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun yang menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah. Yang terdiri dari pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja nyata indikator “Nilai LPPD Kota” adalah Predikat Sedang dari target Predikat Sangat Tinggi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 80%. Tahun 2023 tidak dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan sistem penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun berdasarkan sistem tersebut, hasil evaluasi kinerja tahun Kota Batam atas LPPD tahun 2023 meraih peringkat ke-11 dengan skor 3,4344 dengan status tinggi dari 420 kabupaten/kota se Indonesia.

Faktor pendukung untuk tercapainya indikator sasaran Nilai LDDP Kota, diantaranya dengan menyelenggarakan bimbingan teknis dengan narasumber dari pemerintah pusat secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap indikator kinerja kunci dan memberikan data dukung yang valid dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain:

1. Pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah.
2. Lebih optimal dapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci dan dokumentasi kinerja kota lainnya.
3. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penilaian LPPD dan mendapatkan jawaban tertulis terkait penilaian LPPD Setiap tahunnya

**Gambar**  
Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LPPD 2022  
Pelaporan Tahun 2023



**Sumber:** Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kota Batam

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas ini adalah :

1. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	13.159.428.386,-	3.827.576.423,-	29,09

2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.196.535.000,-	2.758.339.220,-	86,29
Total		16.355.963.386,-	6.585.906.643,-	40,27

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

2. Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Pengawasan	247.056.000,-	220.608.000,-	77,26

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

3. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	108.230.383.800,-	98.361.416.725,-	90,88

**Sumber:** Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam

4. Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian pengembangan Pembangunan daerah Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.441.271.100,-	1.338.525.596,-	92,87

2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	95.140.000,-	88.015.000	92,51
3.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	385.475.700,-	379.463.500,-	98,44
Total		1.921.886.800,-	1.806.004.096,-	93,97

*Sumber: Bapelitbangda dan BPKAD Kota Batam*

## 11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

**Indikator Kinerja: Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**

TAHUN	KINERJA			TARGET RPJMD (2026)	CAPAIAN REALISASI THD TARGET RPJMD (2026)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
2022	3.09	2.85	92.23	3,86	73,83
2023	3,18	3,77	118,55		97,67

Realisasi kinerja nyata indikator “Indeks SPBE” adalah sebesar 3,77 dari target sebesar 3,18 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 118,55%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Apabila dibandingkan target akhir RPJMD Kota Batam dengan target sebesar 3,86 maka capaian kinerja sasaran indikator pada tahun 2023 sudah mencapai 97,67%.

Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kota Batam yang telah dilakukan mulai tahun 2018. Dalam usaha pelaksanaan SPBE tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Kota Batam menerapkan kewenangan SPBE ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Dengan hasil capaian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Bahkan Indeks SPBE Kota Batam ini adalah indeks tertinggi se Kepulauan Riau dan Peringkat Ke 4 Se Sumatra. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa faktor pendukung yang ada, yakni:

1. Komitmen Pemerintah Kota Batam dalam Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
3. Ketersediaan tenaga programmer yang handal yang sangat mendukung dalam pembangunan aplikasi layanan publik di Pemerintah Kota Batam.
4. Tingginya minat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi secara langsung.

Namun, dengan pencapaian yang melebihi target, bukan berarti tidak ada kendala. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Masih kurangnya kompetensi SDM di Perangkat Daerah yang menguasai teknologi informasi dan *update* terhadap perkembangan teknologi.
2. Besarnya anggaran untuk mengembangkan inovasi teknologi digital.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga membuat rendahnya sinergisitas untuk wujudkan digitalisasi pemerintahan.
4. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal

Adapun rekomendasi yang diberikan atas hambatan yang terjadi pada pencapaian tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan terhadap teknologi informasi;
2. Kerjasama dengan daerah lain dalam pemanfaatan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh daerah lain sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Batam;

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.370.403.125,-	4.003.668.935,-	74,55
2.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	82.012.750,-	75.271.066,-	91,78
3.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	86.038.300,-	78.972.448,-	91,79
Total		5.538.454.175,-	4.157.912.449,-	75,07

## B. PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Sasaran/ Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
<b>Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor Perindustrian, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing</b>						
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,91	6,84	115,74	15.731.118.973,-	12.271.508.018,-	78,01
<b>Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Yang Merata Dan Inklusif</b>						
Indeks Gini	0,325	0,336	96,73	14.246.592.512,-	11.109.003.636	77,98

<b>Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Serasi Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan</b>						
Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	69,40	71,44	102,94	462.522.681.894,-	354.506.728.583,-	76,65
<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Bertaqwa Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera</b>						
Indeks Pembangunan Manusia	81,74	82,64	101,10	536.481.651.528,-	491.634.762.373,85	91,64
Persentase Penduduk Miskin	4,69	5,02	93,43	17.907.088.045,-	16.069.457.308,-	89,74
<b>Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Memperluas Akses Hinterland</b>						
Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	59,41	67,94	114,36	122.525.723.288,-	92.846.952.545,-	75,78
<b>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Akuntabel, Transparan Dan Mengayomi</b>						
Indeks Reformasi Birokrasi	70,01 (B)	81,92 (A-)	117,03	5.438.866.500,-	4.252.509.861,-	78,19
<b>Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam</b>						
Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	9,51	44,37	466,56	940.526.000,-	748.786.282,-	79,61
<b>Meningkatnya Peran Gender Dan Pemuda Dalam Pembangunan</b>						
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,46	94,75	100,31	19.366.892.440,-	16.772.459.957,-	86,60

<b>Menurunnya Angka Pengangguran</b>						
Tingkat pengangguran terbuka	9,75	8,14	119,78	19.049.357.317,-	18.812.933.483,-	98,76
<b>Terwujudnya Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas</b>						
Opini BPK	WTP	WTP	100	16.603.019.386-	6.806.514.643,-	41,00
Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sedang	80	110.152.270.600,-	100.167.420.821,-	90,94
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi</b>						
Indeks SPBE	3,18	3,77	118,55	5.538.454.175,-	4.157.912.49,00	75,07
Total				1.346.504.242.658,-	1.130.156.949.959,85	83,93

**Sumber:** Pengolahan Data

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Batam menggunakan anggaran sebesar Rp 1.346.504.242.658,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.130.156.949.959,85 atau sebesar 83,93%. Pemerintah Kota Batam memiliki rata-rata capaian sebesar 118,40% dengan realisasi anggaran sebesar 83,93% yang berarti penggunaan anggaran sebesar 34,47% efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal adalah meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Bapelitbangda dan BPKAD selaku pengelola keuangan yang mengelola anggaran dan kegiatan dalam merencanakan kegiatan, memantau realisasi anggaran, dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

Dari capaian kinerja yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan target pada akhir periode RPJMD tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kota Batam dapat tercapai.

Kedepannya, Pemerintah Kota Batam akan memperkuat dan mempertajam regulasi agar lebih implementatif, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi stakeholders terkait baik internal maupun eksternal, termasuk mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai mitra strategis dalam mengawal pencapaian kinerja. Secara internal, Pemerintah Kota Batam melakukan penataan dan meningkatkan kompetensi SDM, serta memanfaatkan teknologi informasi memastikan Pemerintah Kota Batam mampu mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

Sebagai organisasi yang telah mengimplementasikan manajemen berorientasi hasil, Pemerintah Kota Batam memfokuskan semua aktivitasnya pada layanan prima (*service excellence*) dalam rangka melaksanakan tugasnya, baik di lingkungan internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja.

# LAMPIRAN

## Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

Lampiran 3 Daftar Penghargaan Kota Batam Tahun 2023

Lampiran 4 Pernyataan Di Reviu

Lampiran 5 Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

# Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOTA BATAM



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUDI

Jabatan : WALI KOTA BATAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

BATAM, 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BATAM,



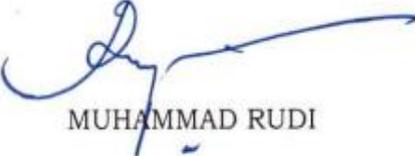
MUHAMMAD RUDI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KOTA BATAM**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,91%
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	2. Indeks Gini	Indeks	0,325
3	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	3. Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	69,40
4	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,74
		5. Persentase penduduk miskin	Persen	4,69%
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	6. Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	59,41
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70 (B)
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8. Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	9,51%
8	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,46
9	Menurunnya angka pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,75%
10	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	11. Opini BPK	Opini	WTP
		12. Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	13. Indeks SPBE	Indeks	3,18

BATAM, 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BATAM

  
 MUHAMMAD RUDI

# Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2024

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOTA BATAM



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUDI

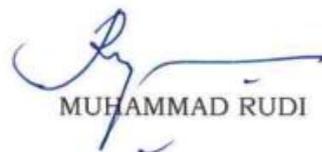
Jabatan : WALI KOTA BATAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batam, 31 Januari 2024

WALI KOTA BATAM,



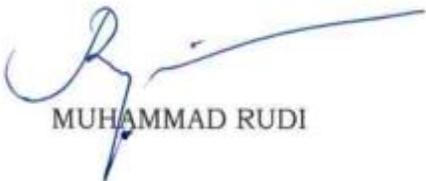
MUHAMMAD RUDI

**PERJANJIAN KINERJA  
KOTA BATAM TAHUN 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	6,93%	BPS
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	2. Indeks Gini	Indeks	0,320	BPS
3	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	3. Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	73,40	CKTR, DLH, Dishub, Perkim, Bina Marga
4	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,75	BPS
		5. Persentase penduduk miskin	Persen	4,68%	BPS
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	6. Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	68,00	CKTR, Dishub, Perkim, Bina Marga
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74 (BB)	Setdako (Bagian Organisasi), Inspektorat
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8. Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	11,61%	DPMPSTP, BP Batam
8	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,75	Dinas Pemberdaya Perempuan
9	Menurunnya angka pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,14%	Disnaker
10	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	11. Opini BPK	Opini	WTP	BPKAD
		12. Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Setdako (Bagian Tata Pemerintahan)
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	13. Indeks SPBE	Indeks	3,77	Diskominfo

Batam, 5/ Januari 2024

WALI KOTA BATAM,

  
 MUHAMMAD RUDI

## Daftar Penghargaan Kota Batam Tahun 2023

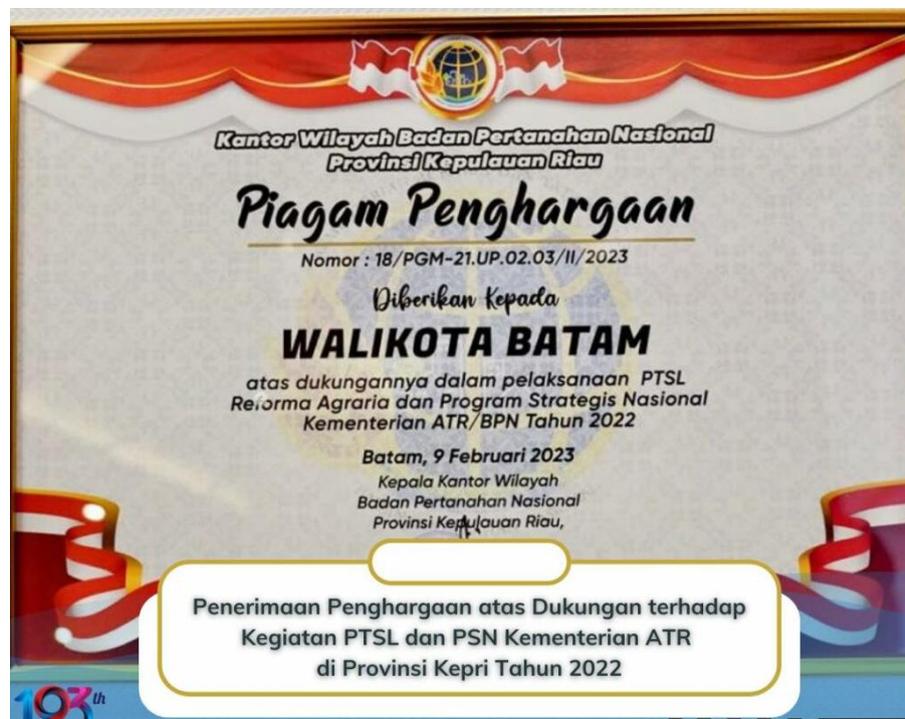
- 1 Penghargaan Indeks Maturitas Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) dengan Skor 314 dan Indeks 0,79 masuk Kategori Patuh, dari KASN kepada Pemko Batam (02 Februari 2023)

HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEPATUHAN  
PELAKSANAAN NKK MELALUI INSTRUMEN  
MATURITAS NKK TAHUN 2022

NO.	INSTANSI	SKOR	INDEKS	KATEGORI
9	 Kementerian Perindustrian	331	0,83	PATUH
10	 Ombudsman Republik Indonesia	315	0,79	PATUH
11	 Pemkot. Batam	314	0,79	PATUH
12	 Kementerian Dikbudristek	313	0,78	PATUH
13	 Lembaga Administrasi Negara	307	0,77	PATUH
14	 Kementerian Kelautan dan Perikanan	305	0,76	PATUH
15	 Pemprov. Jawa Timur	305	0,76	PATUH
16	 Pemprov. Sulawesi Selatan	297	0,74	CUKUP PATUH



- 2 Piagam Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada Walikota Batam atas Dukungan Terhadap Kegiatan PTSL dan PSN Kementerian ATR di Prov. Kepri Tahun 2022  
(Batam, 09 Februari 2023)



- 3 Penghargaan Asia Leaders Award 2023 dari Asia Global Council kepada H. Muhammad Rudi selaku Walikota Batam kategori Asia Visioner Leaders of Indonesia 2023; (Bali, 24 Februari 2023)



- 4 Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI kepada Kota Batam atas Dukungan dan Kontribusi Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Capaian Universal Health Coverage;  
(Jakarta, 14 Maret 2023)



5 Juara Umum STQ Ke-X Provinsi Kepri;  
(Karimun, 14 Mei 2023)



- 6 Piagam Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah Sub Kategori "Pencegahan 3 Dosa Besar Pendidikan" dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi kepada Kota Batam (Pemerintah Daerah Transformatif Tingkat Kabupaten/Kota Non 3T) dalam rangka Bulan Merdeka Belajar memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023; (Jakarta, 22 Mei 2023)  
(NB: Diserahkan Di Yogyakarta, 29 Mei 2023)



- 7 Penghargaan UKPBJ Proaktif dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) kepada Pemko Batam; (Jakarta, 24 Mei 2023)



- 8 Piagam Penghargaan dari Gubernur Kepri kepada Pemerintah Kota Batam, Peringkat 1 Atas Kinerja Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kepri; (Tanjungpinang, 26 Mei 2023)



- 9 Penghargaan dari KASN kategori Pengawasan Proses Pengisian JPT dalam rangka Meningkatkan Indeks Kualitas Pengisian JPT di Instansi Pemerintah;  
(15 Juli 2023)



- 10 Penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Sedang dari Kemendagri kepada Kota Batam . (Dompak, 17 Juli 2023)



- 11 Piagam Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2023 Kategori Nindya, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Pemko Batam; (Semarang, 22 Juli 2023)



- 12 Penghargaan Indonesia Future Leader Award (IFLA) 2023 dari Seven Media Asia kepada Walikota Batam Kategori: "No.1 Best Future Leaders of Indonesia 2023" Inovator Pembangunan.  
(Batam, 28 Juli 2023)



- 13 Piagam Penghargaan Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI) kepada Pemerintah Kota Batam atas Rekor Replika Dapur Arang dari Rangkaian Luti Gendang Terbanyak.  
(Jakarta, 25 Agustus 2023)



- 14 Piagam Penghargaan Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI) kepada Pemerintah Kota Batam atas Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah di Pulau Terbanyak.  
(Jakarta, 25 Agustus 2023)



- 15 Penghargaan Sebagai Pengelola Rumah Susun (Rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terbaik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); (31 Agustus 2023)



- 16 Penghargaan atas Kontribusi dalam Percepatan Penurunan Stunting 2019-2023 dari Deputy Bidang Bukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden kepada Pemerintah Kota Batam;  
(Jakarta, 06 Oktober 2023)



- 17 Penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Kota Batam atas LHP LKPD Kota Batam Tahun 2022 dengan Capaian Opini BPK **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** 11 kali berturut-turut. (Kepri, 12 April 2023)



- 18 Penghargaan Pasar tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI kepada Kota Batam.  
(Bandung, 10 November 2023)



- 19 Piagam Penghargaan dari BAZNAS Prov. Kepri kepada H. Muhammad Rudi atas Dukungan Pengelolaan Zakat, Infak & Sedekah di Kota Batam;  
(Tanjungpinang, 21 November 2023)



- 20 Penghargaan sebagai Kabupaten / Kota Dengan Pencapaian persentase Posyandu Aktif Terbaik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam.  
(21 November 2023)



- 21 Penghargaan Germas Award dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam sebagai Juara 1 Evaluasi dan Refleksi Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.  
(21 November 2023)



22 Penghargaan People of The Year (POTY) Tahun 2023 untuk Kategori Government Officer For Empowerment & Education In Creative Learning & Inclusivity dari Metro TV kepada Walikota Batam. (Jakarta, 24 November 2023)



- 23 Sertifikat Penghargaan dari KPK RI kepada Pemerintah Kota Batam sebagai Pemerintah Daerah dengan Nilai Penertiban Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Terbesar Tahun 2022 Tingkat Prov. Kepri; (Batam, 28 November 2023)



24 Penghargaan Kota Sehat (KKS) / Swasti Saba Kategori Padapa dari Kemendagri & Kemenkes RI kepada Kota Batam.  
(Jakarta, 28 November 2023)





PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Batam, 26 Maret 2024



Inspektur Daerah Kota Batam

Hendriana Gustini, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680824 199008 2 001



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Gedung Dinas Bersama Lantai 3  
Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota Telp. (0778) 4160801  
Email : inspektoratbatam@gmail.com  
BATAM

Kode Pos 29464

Nomor : 012/700.1.2.8/INSP/III/2024  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja  
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

Batam, 26 Maret 2024

Yth. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kota Batam  
di Batam

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. Pernyataan Reviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan kinerja adalah penyajian manajemen Pemerintah Kota Batam.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan kinerja atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

## **2. Dasar Reviu**

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- 4) Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Batam Nomor:700.1.2/012/INSP/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

## **3. Waktu Pelaksanaan Reviu**

Reviu dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 04 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024.

## **4. Tujuan dan Sasaran Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

## **5. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah rancangan akhir Laporan Kinerja serta mekanisme penyusunan laporan, pengumpulan data dan sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

## **6. Simpulan dan Saran**

### **1) Simpulan**

Dari hasil reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Format dari Laporan Kinerja telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersajinya di dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Batam informasi antara lain:

- a) Uraian singkat organisasi;
  - b) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
  - c) Hasil pengukuran kinerja atas capaian perjanjian kinerja;
  - d) Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disusun oleh manajemen Pemerintah Kota Batam melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam. Di dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Standard Operating Procedure* Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada Lampiran II huruf B poin 5 dijelaskan bahwa untuk penyusunan LAKIP atau LKjIP menjadi tanggung jawab dari Inspektorat Kota Batam. Hal ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dikarenakan didalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan APIP daerah untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja dan mengeluarkan pernyataan telah di reviu yang ditandatangani oleh pimpinan APIP sehingga perlu segera dilakukan revisi.
- c. Substansi Laporan Kinerja dinilai telah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dengan keselarasan antara tujuan, sasaran dan indikator dalam perjanjian kinerja dengan rencana strategis serta keselarasan IKU laporan kinerja dengan IKU yang ditetapkan. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tidak dilakukan tersendiri namun menjadi bagian dalam penjelasan hasil analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

## 2) Saran

Berdasarkan beberapa simpulan diatas ada hal yang perlu menjadi perhatian bagi manajemen Pemerintah Kota Batam untuk penyusunar selanjutnya yaitu, Melakukan revisi Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Standard Operating Procedure* Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada Lampiran II huruf B poin 5 Tabel Tata Kelola Pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kota Batam dari penanggung jawab Lakip Kota adalah Inspektorat Daerah menjadi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam sebagaimana kondisi pelaksanaan saat ini.

Demikian kami sampaikan hasil reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680824 199008 2 001